

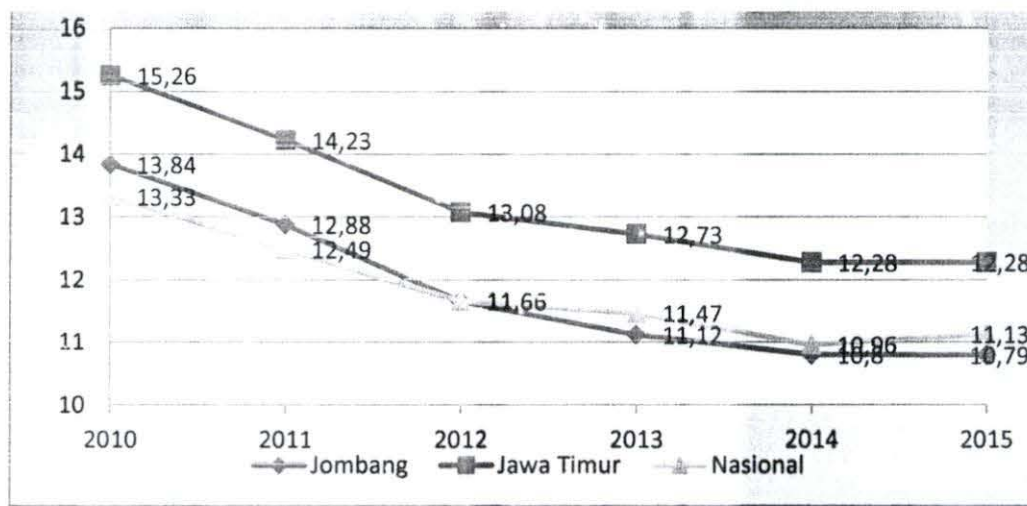
Indeks standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan atau paritas daya beli guna mengukur kemampuan masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya melalui kemampuan daya beli.

Pada tahun 2016 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Jombang mencapai Rp. 9.813.175,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.825,00 dari Rp. 9.802.350,00 pada tahun 2015. Pencapaian ini menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perkapita masyarakat pada tahun 2016 semakin membaik dibandingkan pada tahun 2015 seiring dengan semakin membaiknya perekonomian masyarakat di Kabupaten Jombang baik ditandai dengan menurunnya inflasi tahunan di Kabupaten Jombang serta laju pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami percepatan.

### 2.1.2.3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan berdasarkan konsep Biro Pusat Statistik (BPS) adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

**Gambar 2.12**  
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang Periode tahun 2010-2015**



Sumber data: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2016

### 2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

#### 2.1.3.1 Urusan Pendidikan

##### a. Angka partisipasi murni

Indikator pendidikan lainnya yang sangat mempengaruhi tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar



sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun.

APM Kabupaten untuk jenjang tingkat SD/MI Jombang pada tahun 2011 sebesar 95,37, dan di tahun 2012 menjadi 95,57 meningkat menjadi 95,58 di tahun 2013, lalu mengalami kenaikan menjadi 95,95 pada Tahun 2014, lalu naik lagi menjadi 95,99 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 96,99% di tahun 2016.

Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs (usia 13-15 tahun) pada tahun 2011 sebesar 78,03, lalu di tahun 2012 meningkat menjadi 85,04 sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 95,02, akan tetapi agak menurun menjadi 85,31 pada Tahun 2014 dan sedikit naik menjadi 85,46 pada tahun 2015, lalu kemudian meningkat menjadi 85,61% pada tahun 2016.

Peningkatan APM pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan disamping juga peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas sekolah yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya.

Perkembangan APM tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.6**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 s.d 2016**  
**Kabupaten Jombang**

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	APM SD/MI	95,57	95,58	95,95	95,99	96,99
2.	APM SMP/MTs	85,04	95,02	85,31	85,46	85,61

*Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Data diolah*

Jika ditinjau per kecamatan, APM di Kabupaten Jombang seperti tersaji dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.7**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2016 Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Jombang**

No.	Kecamatan	APM	
		SD/MI	SMP/MTs
1	Bandar Kedungmulyo	85,78	78,68
2	Perak	103,63	97,08
3	Gudo	88,61	64,10
4	Diwek	97,00	119,51
5	Ngoro	91,25	80,64
6	Mojowarno	88,16	79,82
7	Bareng	84,05	77,90
8	Wonosalam	90,06	70,27
9	Mojoagung	91,08	92,42
10	Sumobito	89,15	74,18
11	Jogo Roto	92,83	96,83
12	Peterongan	101,53	92,56



No.	Kecamatan	APM	
		SD/MI	SMP/MTs
13	Jombang	161,22	117,00
14	Megaluh	91,89	72,10
15	Tembelang	98,89	76,74
16	Kesamben	84,42	67,23
17	Kudu	90,66	60,37
18	Ploso	88,79	26,45
19	Kabuh	86,01	133,40
20	Plandaan	84,56	66,31
21	Ngusikan	88,50	71,48

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Data diolah

#### b. Angka partisipasi kasar (APK)

Indikator pendidikan selanjutnya yang juga sangat menundukung tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2012-2016 tidak banyak mengalami perubahan dan cenderung stabil dan untuk tingkat SD dan SMP. Perkembangan APK tahun 2012-2016 seperti yang ada pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.8**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016**

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	APK SD/MI	105,89	106,80	106,18	106,28	106,61
2	APK SMP/MTs	103,25	104,51	103,25	103,31	103,36

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2016

Jika ditinjau per kecamatan, APK di Kabupaten Jombang seperti tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016 Menurut Kecamatan Di Kabupaten Jombang**

No.	Kecamatan	APK	
		SD/MI	SMP/MTs
1	Bandar Kedungmulyo	94,22	99,51
2	Perak	112,78	118,44



No.	Kecamatan	APK	
		SD/MI	SMP/MTs
3	Gudo	96,97	72,57
4	Diwek	106,69	145,65
5	Ngoro	100,71	105,30
6	Mojowarno	99,77	108,34
7	Bareng	94,01	104,69
8	Wonosalam	100,03	86,98
9	Mojoagung	99,38	119,84
10	Sumobito	98,74	91,39
11	Jogoroto	102,16	118,39
12	Peterongan	112,62	135,45
13	Jombang	178,74	137,30
14	Megaluh	104,27	92,00
15	Tembelang	109,01	93,11
16	Kesamben	93,91	95,29
17	Kudu	99,33	68,11
18	Ploso	98,73	30,35
19	Kabuh	94,27	141,38
20	Plandaan	96,38	81,70
21	Ngusikan	98,84	84,57

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2016

### 1) Rasio guru/murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk mengetahui rasio guru terhadap murid dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Tahun 2012-2016**

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah Guru	9.179	8.814	9.512	8.636	8.656
1.2.	Jumlah Murid	127.556	123.542	123.015	123.542	122.889
	Rasio	14	14	13	14	14
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1.	Jumlah Guru	5.724	5.621	6.014	5.842	5.371
2.2.	Jumlah Murid	67.445	66.269	69.225	66.269	70.412
	Rasio	12	12	12	11	12

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat kecenderungan rasio jumlah guru dan murid menunjukkan tren yang stabil dalam 5 tahun terakhir baik untuk tingkat SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini menunjukkan tetap terjaganya perbandingan jumlah ideal antara guru dan murid di Kabupaten Jombang,



sehingga mutu pengajaran tetap terjaga. Rasio jumlah guru dan murid tidak terpengaruh oleh kondisi wilayah kecamatan di perkotaan ataupun di pinggiran, karena bisa jadi yang di pinggiran lebih rendah rasionya.

Sedangkan jika dibandingkan dengan standar nasional maka pada tahun 2016 rasio jumlah guru dan murid untuk jenjang SD/MI sebesar 1:14 masih di bawah standar nasional sebesar 1:23. Demikian juga pada tingkat SMP/MTs rasio jumlah guru dan murid sebesar 1:12 masih di bawah standar nasional yang sebesar 1:16. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru untuk jenjang pendidikan dasar baik SD maupun SMP telah mencukupi perbandingan ideal yang ditetapkan secara nasional.

### **c. Fasilitas pendidikan**

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang bersama seluruh stakeholder yang ada berupaya menjamin ketersediaan bangunan sekolah dalam kondisi baik. RPJMD 2014-2018 memuat bahwa jumlah sekolah dalam kondisi baik sebanyak 92,39% pada tahun 2014.

Perkembangan jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik selama dua tahun terakhir menunjukkan tren yang naik. Untuk SD/MI sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni 93,13 % di tahun 2013 meningkat menjadi 93,98% pada tahun 2015 dan menjadi 94,16% pada tahun 2016. Sedangkan untuk SMP/MTs menunjukkan tren yang menggembirakan yakni meningkat dari 83,99% pada tahun 2011, meningkat menjadi 97,68% pada tahun 2012, naik menjadi 97,88 pada tahun 2014, dan tetap pada tahun 2015 yaitu 97,88%, lalu kemudian sedikit menurun pada tahun 2016 menjadi 97,84%. Adapun untuk SMA/SMK/MA cenderung stabil, yakni dari 91,25% di tahun 2012 meningkat menjadi 94,72 % di tahun 2013 dan naik menjadi 94,77% pada tahun 2014, lalu naik signifikan pada tahun 2015 menjadi 98,17%, namun turun menjadi 96,64% pada tahun 2016.

### **d. Angka putus sekolah**

Angka Putus Sekolah dihitung berdasarkan angka (jumlah siswa) putus sekolah per 1.000 siswa pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka putus sekolah dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin menggembirakan dengan semakin turunnya angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan dasar. Untuk tingkat SD/MI capaian angka putus sekolah mengalami penurunan menjadi 0,01% dari angka yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan di tahun 2015 yakni sebesar 0,04% dibandingkan tahun 2014 yang capaiannya sebesar 0,02%. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs, di tahun 2016 angkanya tetap dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,15% yang turun dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,18%. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Jombang sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:



**Tabel 2.11**  
**Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2014 - 2016**

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
1	SD/MI	0,02	0,04	0,01
2	SMP/MTs	0,18	0,15	0,15

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2016

**e. Angka kelulusan sekolah**

Angka Kelulusan Sekolah dihitung berdasarkan angka (jumlah siswa) yang lulus pada setiap jenjang pendidikan. Realisasi angka kelulusan sekolah yang dicapai pada tahun 2016 untuk SD/MI sebesar 99,95% meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 99,91%. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs, angka kelulusan sebesar 99,97% dibanding tahun sebelumnya sebesar 98,45%. Peningkatan angka kelulusan ini menunjukkan kecenderungan semakin meningkatnya kualitas pendidikan pada semua tingkatan pendidikan.

**2.1.3.2. Urusan Kesehatan**

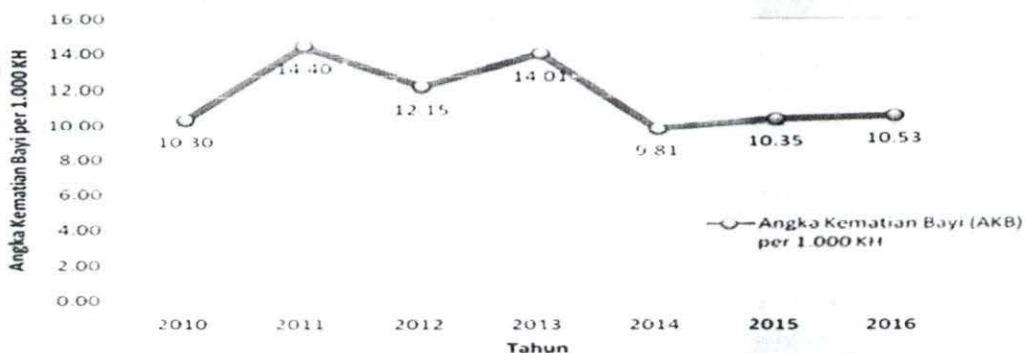
**a. Angka kematian bayi (AKB)**

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara waktu bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu.

Angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun yang sama. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi.

Pada tahun 2016 ini tercatat kematian bayi sejumlah 205 dari 19.815 bayi Lahir Hidup dengan demikian AKB tahun 2016 sebesar 10,35 per 1.000 Kelahiran Hidup. Adapun perkembangan AKB Kabupaten Jombang sebagaimana grafik berikut:

**Gambar 2.13**  
**Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)**  
**Kabupaten Jombang Tahun 2010-2016**  
**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH**

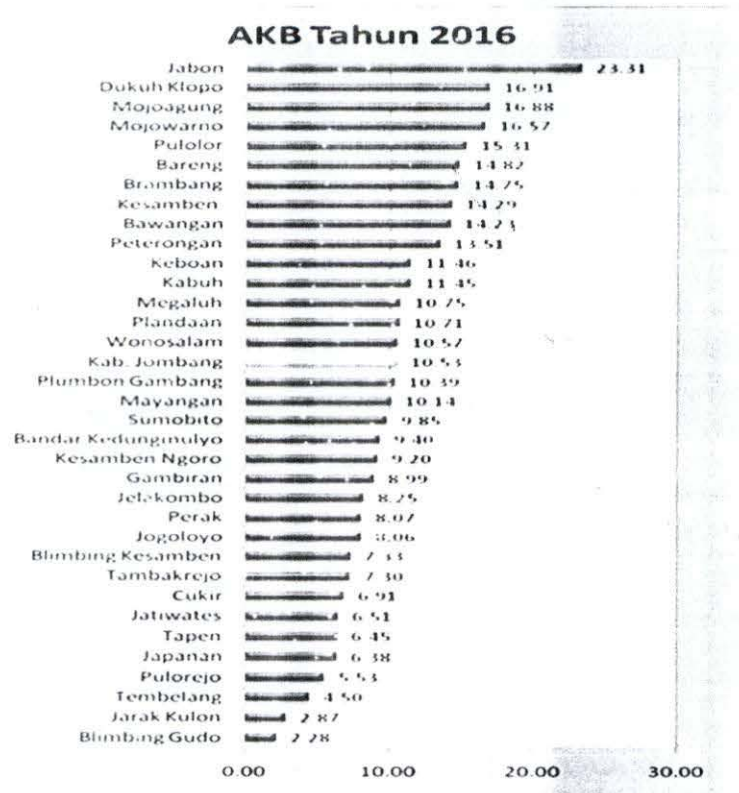


Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kabupaten Jombang LB3 KIA 2010 – 2016



Sebagaimana dalam gambar 2.13 AKB Kabupaten Jombang mengalami fluktuasi dari tahun 2010-2016. AKB mengalami fluktuasi yang sangat signifikan pada tahun 2010 hingga tahun 2014 (14 per KH) tetapi kemudian laju AKB berhasil dikendalikan pada tahun 2015-2016 sehingga peningkatan AKB tidak signifikan.

**Gambar 2.14**  
**Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2016**



Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kabupaten Jombang LB3 KIA 2016

AKB tertinggi berada di wilayah kerja Puskesmas Jabon sebesar 23,31 per 1.000 KH sedangkan AKB terendah berada di wilayah kerja Puskesmas Blimbing Gudo sebesar 2,28 per 1.000 KH.

**b. Angka kematian ibu (AKI)**

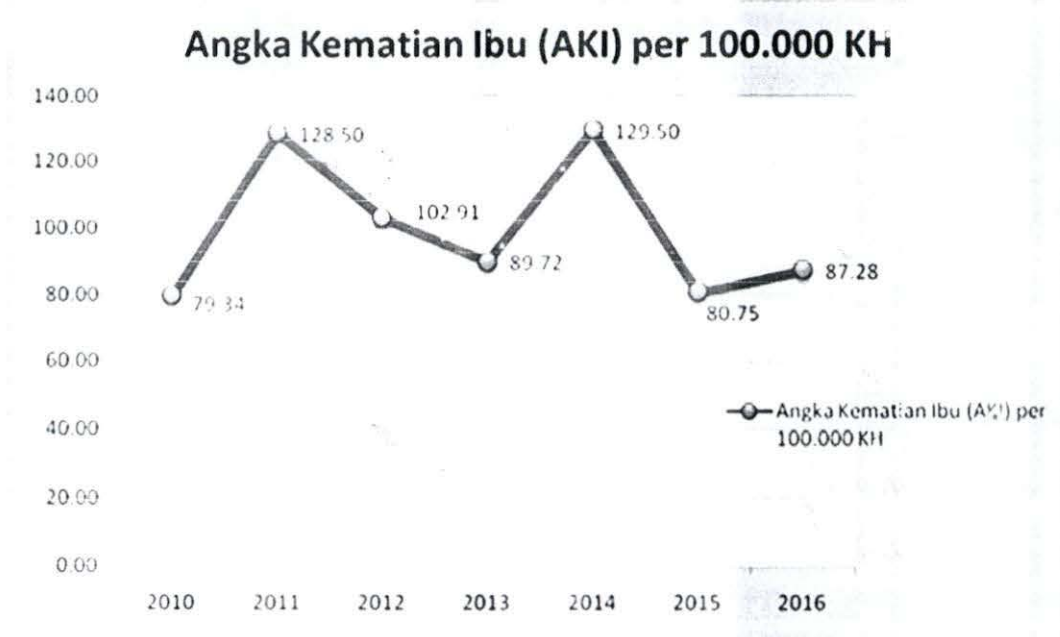
Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan, persalinan dan nifas, serta penanganannya dalam hal ini tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas dimulai sejak 6 jam pasca salin sampai dengan 42 hari setelah melahirkan tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup.

Terdapat beberapa indicator yang digunakan untuk mengukur status kesehatan ibu pada suatu wilayah, salah satunya adalah angka kematian ibu (AKI). AKI merupakan indicator yang peka terhadap kualitas dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan. Menurunkan angka kematian ibu menjadi sebesar 89 per 100.000 kelahiran hidup dan terealisasi pada tahun 2016 sebesar 87,28 per 100.000 kelahiran hidup (dengan kasus kematian 17 kasus) atau capaian kinerjanya sebesar 101,97%. Capaian ini menurun dibanding tahun sebelumnya tahun 2015 yang capaiannya sebesar 80,9 per 100.000



kelahiran hidup (dengan kasus kematian 16 kasus). Kasus kematian ibu terbanyak yaitu karena penyerta kehamilan dan persalinan (Jantung, Sesak serta gagal ginjal), untuk mengantisipasi penyebab kematian itu perlu deteksi sedini mungkin terhadap penyebab penyakit itu melalui pemeriksaan rutin ke Bidan atau Dokter. Rencana tindak lanjut ke depan perlu dilakukan pendampingan ibu hamil Resiko Tinggi oleh Kader dan Mahasiswa melalui gerakan GEBRAK, pembinaan PONEK oleh PONEK, serta melakukan AMP (Audit Maternal Perinatal) setiap ada kasus kematian. Berikut ini gambaran AKI di Kabupaten Jombang tahun 2010-2016.

**Gambar 2.15**  
**Angka Kematian ibu di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2010-2016**



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2010-2016

### c. Angka harapan hidup

Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Untuk Kabupaten Jombang AHH selama 4 tahun mengalami naik turun, yakni tahun 2012 sebesar 71,93 turun menjadi 71,92 pada tahun 2013 (0,01%), lalu naik menjadi sebesar 73,77 pada tahun 2014 (2,57%), kemudian turun lagi menjadi 71.83 pada tahun 2015 (2,63%). Penurunan AHH pada tahun 2016 tersebut disebabkan adanya perubahan dalam metode perhitungannya sehingga angka yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan metode perhitungan tahun 2014.

Perkembangan angka harapan hidup tahun 2011-2016 seperti digambarkan pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 2.16**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2011-2016**



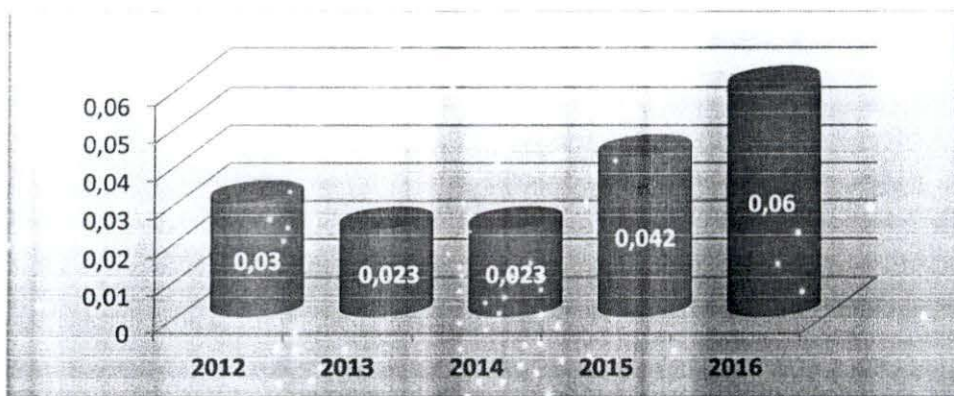
Sumber data: IPM Kabupaten Jombang, Tahun 2016

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan AHH dari tahun 2014 – 2016. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan dalam metode perhitungan sehingga angka yang dihasilkan lebih rendah dari pada menggunakan metode perhitungan AHH pada tahun 2014. Meskipun demikian AHH Kabupaten Jombang lebih tinggi dibandingkan dengan AHH Jawa Timur sebesar 70,61 pada tahun 2014. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jombang, dinilai dengan menggunakan empat indikator yaitu angka kematian (mortalitas), angka kesakitan (morbiditas), angka harapan hidup dan status gizi.

#### **d. Persentase balita gizi buruk**

Status gizi Balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat status gizi masyarakat. Perkembangan prosentase Balita gizi buruk di Kabupaten Jombang selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Yakni pada tahun 2012 sebesar 0,03% pada tahun 2012, kemudian turun lagi menjadi 0,023% pada tahun 2014, tahun 2015 sebesar 0,042% dan tahun 2016 sebesar 0,06% Perhitungan ini adalah perbandingan gizi buruk yang mendapat perawatan dengan Balita yang ditimbang. Perkembangan prosentase Balita gizi buruk sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini:

**Gambar 2.17**  
**Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2012-2016**



Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2016



**e. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita**

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Perkembangan rasio jumlah Posyandu terhadap jumlah Balita di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2012-2016 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.12**  
**Rasio Posyandu Per Balita**  
**Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Posyandu	Buah	1.555	1.556	1.558	1.560	1.563
2	Jumlah Balita	Balita	100.779	100.257	101.830	99.559	98.460
	Rasio Posyandu	Per 1000 balita	15,43	15,52	15,3	15,7	15,87

*Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2015*

Jumlah Balita di Kabupaten Jombang pada tahun 2016 sebanyak 98.460 Balita yang dilayani oleh 1.563 Posyandu, sehingga rasionya menjadi 15,87 per 1000 Balita, artinya bahwa setiap Posyandu melayani 63 Balita. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dimana setiap Posyandu melayani 64 Balita dan pada tahun 2014 dimana setiap Posyandu melayani 65 Balita pada tahun 2013 dimana setiap Posyandu melayani 64 Balita pada tahun 2012 dimana setiap Posyandu melayani 65 Balita, maka rasio Posyandu per Balita selama lima tahun berturut-turut masih dalam standar nasional rasio Posyandu per satuan Balita yang ditetapkan sebesar 1: : 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah Posyandu di Kabupaten Jombang lebih dari cukup

**f. Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu)**

Selama kurun waktu tahun 2012-2016, jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu tidak mengalami penambahan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama maka setiap Puskesmas dan Pustu pada tahun 2012 melayani 11.505 penduduk, pada tahun 2013 melayani 11.444 penduduk, pada tahun 2014 melayani 11.537 penduduk, dan pada tahun 2015 melayani 11.598 penduduk pada tahun 2016 melayani 11.657. Rasio ini telah memenuhi standar Kementerian Kesehatan yang ditetapkan yaitu 1 Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Perkembangan rasio jumlah Puskesmas dan Puskesmas pembantu di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2011-2015 tersaji dalam tabel berikut:



**Tabel 2.13**  
**Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu**  
**Per 100.000 Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Puskesmas	Buah	34	34	34	34	34
2	Jumlah Pustu	Buah	73	73	73	73	73
3	Rasio Puskesmas dan Pustu	Per 100.000 penduduk	8,69	8,73	8,67	8,62	8,58

*Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2016*

**g. Rasio rumah sakit per satuan penduduk**

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Perkembangan rasio jumlah rumah sakit di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2012-2016 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.14**  
**Rasio Jumlah Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk**  
**Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah RS Umum	Buah	9	10	11	11	11
2	Jumlah RS Khusus	Buah	3	2	2	1	1
3	Jumlah seluruh RS	Buah	12	12	13	12	12
4	Rasio Rumah Sakit	Per 100.000 penduduk	0,97	0,98	1,05	0,968	0,986

*Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2016*

Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Kabupaten Jombang tahun 2016 sebanyak 12 buah, sama dengan tahun 2015. Rasionalnya cenderung mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan peningkatan jumlah penduduk 1 RS melayani 103.415 penduduk pada tahun 2015 dan ada peningkatan 1 RS melayani 103.941 tahun 2016.

**h. Rasio dokter umum per satuan penduduk**

Jumlah tenaga dokter umum di Kabupaten Jombang pada tahun 2016 sebanyak 194 orang pada tahun 2015 sebanyak 133 orang atau meningkat cukup signifikan dibandingkan kurun waktu empat tahun sebelumnya. Dengan jumlah ini, maka setiap dokter rata-rata melayani 8.432 penduduk



pada tahun 2012, melayani 8.330 penduduk pada tahun 2013, melayani 8.285 penduduk pada tahun 2014, melayani 9.331 penduduk pada tahun 2015 dan melayani penduduk 6.429. Perkembangan rasio dokter umum di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2012-2016 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.15**  
**Rasio Dokter Umum Per 100.000 Penduduk**

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Tenaga Dokter	Orang	146	147	149	133	194
2	Rasio Tenaga Dokter Umum	Per 100.000 penduduk	11,86	12,00	12,06	10,72	15,55

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2016

Apabila dibandingkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, maka secara rata-rata Kabupaten Jombang masih perlu penambahan tenaga dokter untuk melayani kebutuhan penduduk dalam bidang kesehatan serta perlu adanya distribusi yang merata disesuaikan dengan jumlah penduduk dalam penempatan tenaga dokter umum di masing-masing kecamatan.

**i. Rasio tenaga medis per satuan penduduk**

Tenaga medis adalah tenaga yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi di semua rumah sakit dan Puskesmas di Kabupaten Jombang. Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Perkembangan rasio tenaga medis di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2012-2016 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.16**  
**Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk**

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Tenaga Medis	Orang	246	256	267	271	387
2	Rasio Tenaga Medis	Per 100.000 penduduk	19,98	20,90	21,63	21,84	31,02

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2016

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Jombang pada tahun 2016 sebanyak 387 meningkat dibanding tahun 2015 sebanyak 116 orang, tahun 2015



sebanyak 271 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, maka setiap tenaga medis melayani 5.004 penduduk pada tahun 2012, melayani 4.783 penduduk pada 2013, melayani 4.623 penduduk pada 2014, melayani 4.579 penduduk pada 2015 dan melayani 3.223 penduduk pada tahun 2016.

### **2.1.3.3. Urusan Pekerjaan Umum**

#### **a. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik**

Perkembangan wilayah di Kabupaten Jombang menjadi daya tarik pada berlangsungnya segala aktivitas kegiatan masyarakat, yang tentu akan membawa pengaruh pada meningkatnya penyediaan prasarana transportasi darat sebagai penunjang utama pergerakan orang maupun barang. Selain itu dengan semakin berkembangnya jenis moda transportasi darat yang tidak sebanding dengan kapasitas dan daya tampung jalan, menjadikan adanya peningkatan dari segi beban kinerja jalan. Dari isu yang telah diidentifikasi tersebut, sebagai permasalahan utama terhadap layanan kinerja jaringan jalan di Kabupaten Jombang, yaitu dengan semakin berkembangnya pertumbuhan wilayah maka akan terjadi peningkatan volume dan jenis moda kendaraan. Dari adanya peningkatan tersebut membawa pengaruh pada semakin meningkatnya beban kinerja jalan dari segi dimensi maupun jenis perkerasan jalan. Terhadap isu maupun permasalahan tersebut, jika ditinjau dari ketentuan Standart Pelayanan Minimal bidang jalan antara lain berupa kondisi jaringan jalan yaitu dalam kondisi mantap dan tidak mantap dari segi konstruksi jalan, aksesibilitas yaitu dari total luas wilayah yang telah dilayani oleh jaringan jalan, mobilitas yaitu dari total panjang jalan yang ada di kabupaten jombang dibagi dengan jumlah penduduk yang mememanfaatkannya, keselamatan jalan yaitu dari ruas jalan yang ada sesuai dengan rencana serta laik untuk dioperasikan. Terhadap beberapa ketentuan tersebut, maka ukuran persentase yang digunakan sebagai acuan adalah 60% dari seluruh ruas jalan di wilayah kabupaten dalam kondisi mantap. Dimana untuk saat ini dalam mewujudkan Standart Pelayanan Minimal tersebut masih hanya dari segi kondisi jalan, dan sebagai gambaran dari kondisi jalan yang ada di Kabupaten Jombang pada tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang nomor 188.4.45/197/415.10.10/2015 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, untuk jalan kabupaten sebanyak 195 ruas atau sepanjang 665.654 Km yang dalam kondisi mantap mencapai 69,8%, dan untuk jalan desa sebanyak 305 ruas atau sepanjang 550.175 Km yang dalam kondisi mantap mencapai 55,16%.

Capaian tersebut, untuk jalan desa masih dibawah target SPM jalan, guna mencapai target SPM tersebut menjadi kewajiban bagi penyelenggara jalan baik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Permukiman untuk memprioritaskan rencana rehabilitasi, pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala agar tingkat pelayanan dapat terpelihara sesuai ketentuan SPM. Memperhatikan hal tersebut maka pada tahun 2017 dari anggaran yang telah dialokasikan untuk rehabilitasi maupun peningkatan jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik ditargetkan dapat mencapai 76,09% atau sepanjang 506.496 Km dari total panjang jalan kabupaten yaitu 665.654 Km, dan untuk jalan desa dalam



kondisi baik ditarget dapat mencapai 62,45% atau sepanjang 343.584 Km dari total panjang jalan desa yaitu 550.175 Km.

**Tabel 2.17**  
**Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten**  
**Tahun 2012-2016**

No	Kondisi Jalan Kabupaten	Satuan	Panjang Jalan Kabupaten				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Baik	Km	364.199	365.435	368.506	410.376	464.626
2	Sedang	Km	120.501	120.422	120.284	106.837	93.924
3	Rusak Ringan	Km	84.611	84.551	84.272	65.567	50.390
4	Rusak Berat	Km	96.343	95.246	92.592	82.874	56.714
5	Jumlah	Km	665.654	665.654	665.654	665.654	665.654
	<b>Rasio (1)/(5)</b>	<b>%</b>	<b>54,71</b>	<b>54,90</b>	<b>55,36</b>	<b>61,65</b>	<b>69,80</b>

Sumber data: Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2016

**Tabel 2.18**  
**Kondisi Jaringan Jalan Desa**  
**Tahun 2012-2016**

No	Kondisi Jalan Desa	Satuan	Panjang Jalan Desa				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Baik	Km	229.624	230.110	230.468	264.964	303.477
2	Sedang	Km	129.169	129.100	128.906	115.042	96.556
3	Rusak Ringan	Km	108.251	108.015	107.999	94.245	80.821
4	Rusak Berat	Km	83.131	82.950	82.802	75.924	69.321
5	Jumlah	Km	550.175	550.175	550.175	550.175	550.175
	<b>Rasio (1)/(4)</b>	<b>%</b>	<b>41,74</b>	<b>41,82</b>	<b>41,89</b>	<b>48,16</b>	<b>55,16</b>

Sumber data: Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2016

#### **b. Rasio jaringan irigasi**

Merujuk pada salah prioritas pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan kedaulatan pangan sebagaimana dalam RPJMN periode 2015-2019, diarahkan pada peningkatan dan perkuatan ketersediaan bahan pangan, terhadap sasaran tersebut akan berkaitan langsung dengan luasan areal lahan pertanian, produksi hasil pertanian serta jumlah penduduk. Berkenaan dengan luasan areal lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jombang pada tahun 2016 ini memiliki areal seluas 45.341 Ha atau turun 0,33% dari luas areal pertanian pada tahun 2015 seluas 45.490 Ha. Dari luas areal lahan pertanian tersebut jika dikaitkan dengan tingkat hasil produksi padi pada satu kali panen sebesar 6,3 Ton/Ha, maka total produksi padi di Kabupaten Jombang mencapai 1.880.948 Ton atau jika dikonversi menjadi produksi beras dalam satu tahun mencapai 1.222.616 Ton. Memperhatikan hal tersebut apabila dikaitkan dengan tingkat kebutuhan pangan, maka dari jumlah penduduk pada tahun 2016 menapai 1.370.225 Jiwa dengan kebutuhan pangan 342 Gr/Orang/Hari atau 0,124 Kg/Org/Th, maka untuk kebutuhan beras per tahun sebesar 171.045 Ton. Berdasarkan data tersebut di Kabupaten Jombang untuk produktivitas lahan sawah dari total produksi beras yang dihasilkan dibanding dengan jumlah penduduk yang ada pada tahun 2016 mencapai 0,892 atau lebih dari 0,124 artinya masih surplus, demikian pula sampai dengan tahun 2018 dengan pertambahan penduduk



dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,5% atau sebanyak 1.712.281 jiwa, untuk ketersediaan beras mencapai 0,714. memperhatikan hal tersebut jika dikaitkan dengan luasan lahan pertanian yang dipersiapkan untuk menunjang ketahanan pangan dalam bentuk lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas ± 32.234,52 Ha, terdiri dari lahan pertanian yang dikategorikan sebagai lahan pertanian sawah berkelanjutan seluas 28.341,57 Ha dan pengembangan lahan pertanian sawah cukup berkelanjutan seluas 3.892.95 Ha. Apabila diproyeksi untuk 20 tahun kedepan dengan adanya penambahan penduduk menjadi 2.676.973 jiwa dan tingkat produksi rata-rata 5,08 Ton/Ha, maka ketersediaan beras untuk pangan masih mencukupi yaitu sebesar 0,270 dengan ketentuan harus ada peningkatan produksi pertanian. Untuk meningkatkan produksi tersebut diperlukan adanya pembangunan dan peningkatan layanan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi, serta dapat beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi secara optimal.

Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Permasalahan yang dihadapi untuk saat ini adalah belum optimalnya pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur irigasi. Sehingga dipandang perlu adanya penanganan perbaikan jaringan irigasi yang meliputi bangunan saluran dan bangunan pelengkap sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi (drainase). Terhadap sistem irigasi yang ada di Kabupaten Jombang baik jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Menurut kewenangan pengelolaan pada berbagai tingkat pemerintahan di wilayah Kabupaten Jombang, panjang jaringan irigasi dan luas lahan budidaya adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.19**  
**Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2012 - 2015**

No	Jaringan Irigasi	Satuan	Panjang Jaringan Irigasi				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Primer	Km	62,89	62,89	62,89	62,89	62,89
2	Sekunder	Km	434,43	434,43	434,43	434,43	434,43
3	Tersier	Km	886,97	886,97	886,97	886,97	886,97
4	Jumlah	Km	1.384,29	1.384,29	1.384,29	1.384,29	1.384,29
5	Luas Lahan Budidaya	Ha	45.435	45.435	45.490	45.490	45.341
	Rasio (1 + 2 + 3) / (5)	%	3,05	3,05	3,04	3,04	3,05

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Jombang

Apabila ditinjau dari segi layanan irigasi pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 seluas 45.490 Ha menjadi seluas 45.341 Ha atau turun sebesar 4,7%, hal ini terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan banyak areal lahan pertanian tergenang. Selain itu jika dilihat dari kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam menunjang layanan irigasi untuk budaya tanaman pertanian dari luas irigasi yang dilayani yaitu 43.341, terdapat 39.272 Ha yang jaringan irigasinya dalam kondisi baik atau sebesar 90,61%, artinya masih terdapat 9,39% dari total luas lahan



pertanian di Kabupaten Jombang memiliki kondisi jaringan irigasi kurang baik.

**Tabel 2.20**  
**Rasio Luas Areal Layanan Irigasi dalam Kondisi Baik**  
**Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Ha	31.218	33.620	36.021	38.422	39.272
2	Luas irigasi kabupaten	Ha	45.435	45.435	45.490	45.490	43.341
	Rasio (1) / (2)	%	68,71	74,00	79,18	84,46	90,61

*Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Jombang*

Memperhatikan tingkat layanan irigasi berdasarkan kondisi jaringan irigasi sebagaimana tersebut diatas, upaya lain yang kiranya perlu menjadi pertimbangan adalah berkenaan dengan resiko tingkat kehilangan air yang diakibatkan oleh rembesan, evaporasi dan pengambilan air tanpa izin, serta pengambilan air yang berlebihan. Untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya perbaikan teknik budidaya pertanian seperti sistem cocok tanam padi yang hemat air dan penggunaan pupuk organik, metode tersebut dilakukan untuk menghemat air pada musim kemarau sehingga luas pertanaman areal irigasi pada musim kemarau tetap dapat dipertahankan, atau kenaikan Intensitas Pertanaman (IP) pertahun dapat ditingkatkan. Berdasarkan data terkait dengan efektivitas areal lahan pertanian yang dapat terpenuhi kebutuhan air bakunya pada saat Musim Kemarau I, dari areal rancangan yang harus dilayani seluas 45.490 Ha dapat direalisasikan seluas 45.341 Ha atau 99,67%, sehingga masih terdapat sekitar 149 Ha atau 0,33% yang tidak dapat dilayani kebutuhan irigasinya secara optimal.

**Tabel 2.21**  
**Rasio Indeks Pertanaman**  
**Tahun 2012 - 2015**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Areal Lahan Terairi	Ha	45.005	45.115	45.235	45.245	45.341
2	Luas Areal Rancangan	Ha	45.490	45.490	45.490	45.490	45.490
	Rasio (1) / (2)	%	98,93	99,18	99,44	99,46	99,67

*Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Jombang*

### **c. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik**

Jaringan Irigasi sebagai salah satu sarana untuk memanfaatkan sumber daya air memiliki fungsi sebagai penyedia, pengatur dan penyalur air untuk menunjang lahan pertanian. Untuk dapat mengoptimalkan fungsi tersebut dibutuhkan adanya sistem pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif, hal itu karena dapat memberikan pengaruh pada kuantitas dan kualitas hasil produksi pertanian. Gambaran kondisi pelayanan Jaringan Irigasi di Kabupaten Jombang sangat dipengaruhi oleh faktor usia saluran dan kesinambungan operasi maupun pemeliharaan saluran. Memperhatikan keterkaitan hubungan antara kondisi Jaringan Irigasi dengan tingkat produksi serta produktifitas lahan pertanian, maka dibutuhkan adanya kesinambungan penyusunan rencana dan kegiatan yang tentu akan berdampak pada sisi



kebutuhan pembiayaan. Ditinjau dari kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Jombang, untuk saat ini resiko tingkat kehilangan air dipandang masih sangat besar baik ditingkat tersier, sekunder dan primer, besarnya tingkat kehilangan air tersebut dipengaruhi oleh panjang saluran, luas permukaan saluran, keliling basah saluran dan kedudukan air tanah.

Dari data yang ada untuk panjang Jaringan Irigasi sekunder sepanjang 434,436 Km yang dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2016 sepanjang 212.946 atau sebesar 49,01%, hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya perbaikan jaringan irigasi baik melalui operasi dan pemeliharaan maupun upaya rehabilitasi jaringan. Keberadaan kondisi jaringan irigasi yang kurang optimal tersebut diakibatkan oleh adanya daya rusak air, dimana banyak bangunan irigasi yang longsor akibat banjir serta umur jaringan yang rata-rata diperluakan adanya pemeliharaan jaringan irigasi.

**Tabel 2.22**  
**Kondisi Jaringan Irigasi Primer**  
**Tahun 2012 - 2016**

No	Status Jaringan Irigasi	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Saluran Primer						
	Baik	Meter	29.304	31.804	33.304	34.304	34.474
	Sedang	Meter	19.869	22.369	23.869	24.869	24.889
	Rusak	Meter	13.725	8.725	5.725	3.725	3.535
	<b>Jumlah</b>	Meter	62.898	62.898	62.898	62.898	62.898
2	Bangunan Irigasi						
	Baik	Unit	39	40	41	42	49
	Sedang	Unit	26	27	28	29	28
	Rusak	Unit	19	17	15	13	7
	<b>Jumlah</b>	Unit	84	84	84	84	84

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Jombang

**Tabel 2.23**  
**Kondisi Jaringan Irigasi Sekunder**  
**Tahun 2012 - 2016**

No	Status Jaringan Irigasi	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Saluran Sekunder						
	Baik	Meter	196.496	198.996	200.496	201.496	212.946
	Sedang	Meter	131.331	133.831	135.331	136.331	125.910
	Rusak	Meter	106.609	101.609	98.609	96.609	95.580
	<b>Jumlah</b>	Meter	434.436	434.436	434.436	434.436	434.436
2	Bangunan Irigasi						
	Baik	Unit	29	30	31	32	34
	Sedang	Unit	20	21	22	23	21
	Rusak	Unit	14	12	10	8	8
	<b>Jumlah</b>	Unit	63	63	63	63	63

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Jombang

#### **d. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk**

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah. Berikut adalah tabel data pemakaman yang ada di Kabupaten Jombang yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan dari Dinas PU Cipta Kaya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang, berdasarkan dari data yang ada pada tahun 2014 bahwa rasio



keberadaan tempat pemakaman mencapai 75,8%, untuk dapat memenuhi rasio tempat pemakaman agar sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka kedepannya Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan penyediaan Tempat Pemakaman Umum tersebut dengan menambah luasan khususnya yang milik Pemerintah Daerah untuk per tahunnya 1 (satu) Hasampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Hal itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan kecukupan daya tampung dengan penambahan jumlah penduduk khususnya di wilayah perkotaan.

**Tabel 2.24**  
**Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk**

No	Uraian	Tahun 2015		
		Jumlah (lokasi)	Luas (M <sup>2</sup> )	Daya Tampung (orang)
1	Tempat Pemakaman Milik Pemda	1	15.450	7.725
2	Tempat Pemakaman Milik Yayasan	7	36.600	7.320
3	Tempat Pemakaman Milik Desa	918	1.836.000	918.000
	Jumlah (1+2+3)	<b>926</b>	<b>1.888.050</b>	<b>933.045</b>
	Jumlah penduduk			<b>1.230.881</b>
	Rasio TPU per satuan penduduk (4/5)			<b>75,8%</b>

*Sumber data: Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang, Tahun 2015*

**e. Jumlah sampah yang terangkut ke TPA**

Kegiatan pelayanan persampahan di Kabupaten Jombang dilakukan pada 5 (lima) area pelayanan, yaitu:

- o Meliputi 15 Desa dan Kelurahan di wilayah perkotaan Jombang dengan areal pelayanan seluas ± 2.567 Ha;
- o Meliputi 4 Desa di wilayah perkotaan Ploso, dengan area seluas ± 66 Ha;
- o Meliputi 3 Desa di wilayah perkotaan Ngoro, dengan area seluas ± 740,6 Ha;
- o Meliputi 2 Desa di wilayah perkotaan Perak, dengan area seluas ± 394,8 Ha;
- o Meliputi 8 Desa di wilayah perkotaan Mojoagung, dengan area seluas ± 1.538,9 Ha

Terhadap 5 wilayah pelayanan tersebut, jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengalami peningkatan 46.355,00 pada tahun 2013, menjadi 46.889,15 Ton/Tahun pada tahun 2014, Tahun 2015 47.592,49 Ton/Tahun dari jumlah sampah yang terangkut tersebut masih mencapai 58 % dari total timbulan sampah yang ada, dimana sisanya sebesar 8,87% dilakukan dengan pengomposan sampah organik dan daur ulang sampah non organik, sedangkan 33,3% dikelola sendiri oleh masyarakat dengan ditimbun dan dibakar.

Kegiatan pelayanan persampahan di Kabupaten Jombang dilakukan pada 5 (lima) area pelayanan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:



**Tabel 2.25**  
**Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sampah Terangkut Ke TPA	Ton/Th	21.469,97	22.574,15	28.470,00	28.981.90	29.651.87
2	Timbunan Sampah	Ton/Th	42.579,45	43.512,11	46.355,00	46.889.15	47.592.49
	<b>Rasio (1/2)</b>	Ton/Th	<b>50,42</b>	<b>51,88</b>	<b>61,42</b>	<b>61.80</b>	<b>62.30</b>

*Sumber data: Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang, Tahun 2015*

#### **2.1.3.4. Urusan Perumahan**

##### **a. Penanganan rumah tidak layak huni**

Dalam penyelenggaraan penanganan rumah tidak layak huni harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan sistem, yang pelaksanaannya dapat dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang relevan yaitu dapat disesuaikan berdasarkan kondisi lokal yang ada melalui konsep TRIDAYA, dimana secara prinsip bertujuan memberdayakan komponen sosial masyarakat di tingkat lokal. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, harus dimulai sejak tahap perencanaan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, agar arah perkembangannya tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sesuai RPJMD Tahun 2014-2018, Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan terwujudnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu sejumlah 6.731 unit pada tahun 2018. Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa rumah sebagai bangunan tempat tinggal harus memenuhi unsur-unsur layak huni karena sebagai sarana untuk membina keluarga, sebagai cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. Berdasarkan pengertian tersebut di wilayah Kabupaten Jombang masih banyak dijumpai kondisi rumah yang tidak memenuhi standart atau kriteria sebagai rumah layak huni, untuk itu Pemerintah Daerah memiliki peran untuk melakukan rehabilitasi maupun perbaikan rumah yang tidak layak huni tersebut agar dapat memenuhi standart serta kriteria sebagai rumah layak huni. Hal ini dilakukan juga untuk membantu dan mengurangi beban bagi keluarga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak huni, menciptakan rumah yang sehat dan bersih, serta menciptakan rasa gotong royong di setiap lingkungan permukiman. Untuk mewujudkan hal tersebut pada tahun 2016 telah dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 525 unit, sehingga untuk capaiannya mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah tertangani sebanyak 2.463 unit, sehingga masih kurang sekitar 2.306 unit yang harus diselesaikan pada tahun 2017 dan 2018.

jumlah rumah tidak layak huni yang dilakukan rehabilitasi melalui dana APBD adalah 194 unit, dengan rincian 159 unit melalui Bantuan Keuangan kepada Desa dan 35 unit melalui program Bantuan Sosial, sedangkan dari



dana APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah 748 unit.

**Tabel 2.26**  
**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi**  
**Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah rumah tidak layak huni yang dilakukan rehabilitasi	Unit	125	321	996	942	525

*Sumber data: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2016*

**Tabel 2.27**  
**Realisasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni**  
**Tahun 2012 - 2016**

Tahun	Realisasi RTLH	Target Penanganan	%
2012	125	6.731	1,9
2013	321	6.731	4,8
2014	996	6.731	14,8
2015	942	6.731	14,0
2016	525	6.731	7,8
Jumlah	2.909		43,2

*Sumber data: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2016*

**b. Rumah tangga pengguna air bersih**

Sistem penyediaan air bersih merupakan salah satu komponen prasarana kota. dimana prasarana air bersih memegang peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah, karena prasarana dapat memberikan dampak terhadap peningkatan taraf hidup dan mutu kehidupan masyarakat serta pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonomi masyarakat. Memperhatikan hal tersebut untuk pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2016 mencapai 76,29% yang merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum terlindungi sebesar 286.231 Kepala Keluarga dibagi jumlah seluruh rumah tangga yaitu 375.188 Kepala Keluarga.

**Tabel 2.28**  
**Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah rumah tangga pengguna air minum terlindungi	KK	280.001	280.331	281.114	283.235	286.231
2	Jumlah seluruh rumah tangga	KK	372.115	372.225	373.998	374.115	375.188
	<b>Rasio (1) / (2)</b>	<b>%</b>	<b>75,25</b>	<b>75,31</b>	<b>75,43</b>	<b>75,71</b>	<b>76,29</b>

*Sumber data: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2016*



### c. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Dalam RPJMN 2015-2019, ada tiga *output* prioritas nasional di bidang Cipta Karya untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, yaitu pelayanan air minum, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan sanitasi. Pemerintah menetapkan target terhadap indikator *outcome* 2015-2019 antara lain 100% capaian pelayanan akses air minum, 0% proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak (kumuh) di kawasan perkotaan, dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, data capaian atas kondisi sanitasi di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2016 mencapai 78,16%. Capaian kondisi sanitasi ini didasarkan pada kriteria layanan sanitasi yang layak, yaitu jamban leher angsa, septict dan kedap.

**Tabel 2.29**  
**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Rumah tinggal berakses sanitasi	Unit	321.113	323.225	323.668	324.112	324.536
2	Rumah tinggal	Unit	414.100	414.315	414.578	415.115	415.220
	<b>Rasio (1)/(2)</b>	<b>%</b>	<b>77,50</b>	<b>77,96</b>	<b>78,07</b>	<b>78.08</b>	<b>78,16</b>

Sumber data: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2016

### 2.1.3.5. Urusan Penataan Ruang

#### a. Ruang terbuka hijau

Wilayah perkotaan di Kabupaten Jombang yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, dan pendidikan, serta penyedia fasilitas pelayanan bagi masyarakat. Sehingga mengalami perkembangan yang lebih dinamis akibat adanya perkembangan jumlah penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan terjadinya interaksi dengan wilayah lain. Terhadap berbagai dinamika tersebut dari penambahan jumlah penduduk mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat di bagian wilayah perkotaan. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodasi kepentingannya. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan, karena lahan yang dulunya masih berupa lahan terbuka hijau telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman baru.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka Pemerintah Kabuten Jombang memiliki komitmen untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau berupa taman, jalur hijau pada kanan dan kiri jalan sebagai RTH Publik, dimana untuk saat ini di kawasan perkotaan Jombang memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 46.322.14 Ha atau sebesar 10,56% dari luas wilayah perkotaan (*urban area*) seluas 4.891,82 Ha. Area RTH ini meliputi taman kota, taman rekreasi, hutan kota, lapangan olahraga, serta jalur hijau. Untuk mewujudkan peningkatan luasan RTH Publik, maka dalam RPJM Kabupaten Jombang tahun 20014-2018 untuk setiap tahunnya telah ditetapkan target capaian kinerja melalui



penambahan RTH minimal 1 Ha untuk pertahunnya dan mendorong perluasan RTH Privat untuk Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa RTH pekarangan rumah, pekarangan perkantoran, pekarangan perdagangan dan jasa dengan KDH minimal 10% dari luas persil.

Memperhatikan hal tersebut gambaran tentang ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan Jombang pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.30**  
**Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Jombang**  
**Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	1.255,00	1.257,00	1.259,00	1.264,00	1.488,47
2	Luas Perkotaan Jombang	Ha	4.180,40	4.180,40	4.180,40	4.891,82	4.650,97
	<b>Rasio (1)/(2)</b>	<b>%</b>	<b>30,02</b>	<b>30,07</b>	<b>30,12</b>	<b>30,24</b>	<b>32,00</b>

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2017

**b. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan**

Sampai dengan tahun 2016, terdapat peningkatan jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) selalu ada. Pada tahun 2016, jumlah bangunan yang ber-IMB adalah 225.948 unit, atau 63,66% dari seluruh jumlah bangunan. Perkembangan rasio bangunan ber-IMB pada kurun waktu 2012 sampai dengan tahun 2016 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.31**  
**Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2012-2015**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah bangunan ber-IMB	Bh	221.965	222.018	222.948	255.948	255.948
2	Jumlah bangunan	Bh	365.514	365.514	369.915	402.035	402.035
	<b>Rasio (1)/(2)</b>	<b>%</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>	<b>60%</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>

Sumber data: Dinas Perumahan dan Permukiman, Tahun 2017

**c. Jumlah Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa izin mendirikan bangunan merupakan salah satu jenis izin pemanfaatan ruang yang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pendirian bangunan pada suatu kawasan atau zona berdasarkan rencana tata ruang.



Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta mewujudkan kepastian hukum, setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan izin mendirikan bangunan gedung.

Perkembangan rekomendasi izin mendirikan bangunan dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

**Tabel 2.32**  
**Jumlah Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan**  
**Tahun 2012-2015**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah rekomendasi IMB	Bh	92	113	218	289	502
2	Jumlah permohonan rekomendasi IMB	Bh	92	113	218	335	725

*Sumber data: Dinas Perumahan dan Permukiman, Tahun 2017*

#### **2.1.3.6. Urusan Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program/kegiatan yang tepat, dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan segenap pelaku pembangunan. Dalam era desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Selain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan dituangkan dalam berbagai dokumen rencana pembangunan, baik yang sifatnya jangka panjang, menengah maupun pendek atau tahunan.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan yang mengatur perencanaan pembangunan daerah serta untuk mencapai efektivitas perencanaan pembangunan daerah, maka telah disusun beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen yang telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait perencanaan daerah adalah:

- o Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009;
- o Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014;
- o Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016;



- o Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang yang tiap tahun ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang;
- o Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah menjabarkan RPJMD Kabupaten ke dalam program dan kegiatan lima tahunan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- o Perubahan Rencana Strategis SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala SKPD. Renstra SKPD menjabarkan RPJMD Kabupaten ke dalam program dan kegiatan lima tahunan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- o Rencana Kerja SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2014 yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala SKPD. Renja SKPD menjabarkan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan beberapa upaya pendekatan, yaitu secara teknokratik, partisipatif, *topdown-bottom up* dan politik. Bentuk konkrit dari keterpaduan beberapa pendekatan tersebut diwujudkan secara berjenjang dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) tingkat Desa, tingkat Kecamatan, forum SKPD sampai tingkat Kabupaten. Segenap stakeholder pembangunan serta anggota DPRD diundang untuk turut membahas perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Kualitas penyelenggaraan musrenbang secara bertahap semakin diperbaharui sebagai upaya untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan sebagai langkah-langkah perbaikan, khususnya pada kualitas partisipasi masyarakat dalam musrenbang serta keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat. Capaian atas langkah-langkah yang telah diupayakan diantaranya adalah:

- o Pelembagaan proses perencanaan pembangunan partisipatif dalam Peraturan Bupati Jombang. Dengan ketentuan hukum tersebut, maka pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta transparansi perumusan kebijakan pembangunan merupakan keharusan dan diharapkan dapat semakin ditingkatkan;
- o Pendokumentasian usulan perencanaan pembangunan dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dengan tujuan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam tahapan musrenbang terkelola dengan baik;
- o Kebijakan Pagu Indikatif Desa (PID) yang ditujukan untuk memperkuat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat serta kesinambungan perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk mengurangi disparitas wilayah.



### 2.1.3.7. Urusan Perhubungan

#### a. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum terdiri dari bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan lokal (angkutan perdesaan) serta Mobil Penumpang Umum (MPU) antarkota. Perkembangan jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.33**  
**Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Terminal Kepuhsari-Jombang Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2015
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	5.651.656	5.028.887	4.235.105	3.874.208	3.874.208

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2017

Dari tabel tersebut, terlihat adanya penurunan jumlah penumpang yang datang/berangkat dari Terminal Kepuhsari pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Hal tersebut antara lain didorong oleh Banyaknya kendaraan/angkutan yang menaikkan penumpang di luar terminal. Menurunnya jumlah penumpang terutama angkutan perdesaan akibat semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi.

#### b. Rasio ijin trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek yang ada di Kabupaten Jombang adalah jaringan trayek perdesaan. Pada tahun 2015 terdapat 25 izin trayek yaitu izin trayek angkutan perdesaan. Jumlah ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan. Perkembangan penerbitan izin trayek yang dikeluarkan di Kabupaten Jombang ada tahun 2012-2016 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.34**  
**Jumlah Izin Trayek Perdesaan di Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	unit	248	184	25	25	25

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2015

#### c. Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan



dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, serta kereta gandengan. Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.35**  
**Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kendaraan wajib uji	Unit	8.213	8.403	8.691	8.542	8.542

*Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2017*

**d. Jumlah terminal bis**

Kabupaten Jombang memiliki 4 buah terminal. Dari 4 terminal yang ada, 1 terminal memiliki kualifikasi type B, yaitu Terminal Kepuhsari. Terminal lainnya yang ada di Kabupaten Jombang adalah Terminal Mojoagung, Terminal Ploso, dan Terminal Ngoro. Jumlah terminal di Kabupaten Jombang dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya berkurang satu, yaitu Terminal Tapen hal tersebut dikarenakan menurunnya pengguna angkutan umum yang diikuti dengan berkurangnya jumlah angkutan umum

Perkembangan jumlah terminal bis pada tahun 2012-2016 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.36**  
**Jumlah Terminal Bis di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah terminal bis	Buah	4	4	4	4	4

*Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2017*

**e. Angkutan darat**

Jumlah arus penumpang angkutan darat berupa mobil penumpang umum (MPU) yang tercatat oleh Dinas Perhubungan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Hal tersebut berkorelasi terhadap jumlah angkutan darat yang selama kurun waktu lima terakhir.

**Tabel 2.37**  
**Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah angk darat (MPU)	unit	405	405	405	398	398

*Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2017*



**f. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)**

Jangka waktu proses pengujian angkutan umum yang tercatat oleh Dinas Perhubungan, yakni rata-rata proses pengujian angkutan umum pada tahun 2015 adalah selama 45 menit. Perkembangan durasi waktu pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.38**  
**Jangka Waktu Proses KIR di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jangka waktu proses pengujian angkutan umum	menit	25	25	45	45	45

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2016

**g. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum**

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum di Kabupaten Jombang tahun 2016 sebesar Rp. 45.000,00 untuk angkutan umum berupa truck, bus, microbus, kereta gandengan dan kereta tempel dan sebesar Rp. 35.000,00 untuk angkutan umum berupa MPU, pick up dan mikrolet. Daftar tarif pengujian kelayakan angkutan umum tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.39**  
**Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Truck	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2	Bus	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	Micro Bus	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	Kereta Gandeng	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	Kereta Tempel	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Pick Up	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Mikrolet/ MPU	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2016

**h. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan**

Seiring dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup pesat, khususnya kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4, maka membutuhkan adanya peningkatan prasarana jalan yang cukup tinggi. Ketidakeimbangan pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan panjang jalan akan mengakibatkan kendala dalam kelancaran maupun kenyamanan berlalu lintas. Perkembangan panjang jalan dan jumlah kendaraan di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:



**Tabel 2.40**  
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2015
1	Panjang jalan	m <sup>2</sup>	570.897	570.897	570.897	570.897	570.897
2	Jumlah kendaraan	unit	336.513	367.805	386.125	341.661	341.661
	Rasio (1) / (2)	%	1,70	1,65	1,48	1,68	1,68

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2015

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Jombang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena terus bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan panjang jalan.

### 2.1.3.8. Urusan Lingkungan Hidup

#### a. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdalsangat diperlukan guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan Amdaldi Kabupaten Jombang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah perusahaan yang diawasi. Perkembangan pengawasan terhadap perusahaan wajib Amdal pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.41**  
**Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi	Buah	5	5	5	5	7
2	Jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal	Buah	5	5	5	5	7
	Rasio (1) / (2)	%	100	100	100	100	100

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tahun 2017

**Tabel 2.42**  
**Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	SPPL	Buah	352	294	282	206	301
2	UKL/UPL	Buah	93	62	39	57	62
2	Amdal	Buah	5	5	5	5	7

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tahun 2017



### b. Pencemaran Status Mutu Air

Salah satu indikator kualitas mutu lingkungan adalah status mutu air. Ketersediaan air yang memenuhi kualitas mutu akan turut mendukung tercapainya standar kualitas lingkungan permukiman. Untuk itu, pemantauan terhadap sumber-sumber pencemar kualitas lingkungan harus secara periodik dan berkelanjutan dilaksanakan. Perkembangan pemantauan status mutu air di Kabupaten Jombang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.43**  
**Jumlah Pemantauan Status Mutu Air di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber daya air yang dipantau mutu airnya	Lokasi	59	58	58	58	119
2	Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air	Lokasi	180	180	180	180	180
	Rasio (1) / (2)	%	32	32	32	32	66

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tahun 2017

### c. Penegakan hukum lingkungan

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelestarian lingkungan hidup, maka upaya-upaya dalam menindaklanjuti pelanggaran lingkungan secara konsisten dan berkesinambungan dilaksanakan. Langkah penindakan pelanggaran dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan dan ketentuan perundang-undangan. Perkembangan kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.44**  
**Jumlah Kasus Lingkungan di Kabupaten Jombang Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2015
1	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	Kasus	3	3	19	17	18
2	Jumlah kasus lingkungan yang ada	Kasus	3	3	19	17	18
	Rasio (1) / (2)	%	100	100	100	100	100

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tahun 2017



#### **d. Jumlah sampah yang terangkut ke TPA**

Kegiatan pelayanan persampahan di Kabupaten Jombang dilakukan pada 5 (lima) area pelayanan, yaitu:

- o Meliputi 15 Desa dan Kelurahan di wilayah perkotaan Jombang dengan areal pelayanan seluas ± 2.567 Ha;
- o Meliputi 4 Desa di wilayah perkotaan Ploso, dengan area seluas ± 66 Ha;
- o Meliputi 3 Desa di wilayah perkotaan Ngoro, dengan area seluas ± 740,6 Ha;
- o Meliputi 2 Desa di wilayah perkotaan Perak, dengan area seluas ± 394,8 Ha;
- o Meliputi 8 Desa di wilayah perkotaan Mojoagung, dengan area seluas ± 1.538,9 Ha

Terhadap 5 wilayah pelayanan tersebut, jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengalami peningkatan 46.355,00 pada tahun 2013, menjadi 46.889,15 Ton/Tahun pada tahun 2014, Tahun 2015 47.592,49 Ton/Tahun dari jumlah sampah yang terangkut tersebut masih mencapai 58 % dari total timbulan sampah yang ada, dimana sisanya sebesar 8,87% dilakukan dengan pengomposan sampah organik dan daur ulang sampah non organik, sedangkan 33,3% dikelola sendiri oleh masyarakat dengan ditimbun dan dibakar.

Kegiatan pelayanan persampahan di Kabupaten Jombang dilakukan pada 5 (lima) area pelayanan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

**Tabel 2.45**  
**Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sampah Terangkut Ke TPA	Ton/Th	21.469,97	22.574,15	28.470,00	28.981,90	29.651,87
2	Timbulan Sampah	Ton/Th	42.579,45	43.512,11	46.355,00	46.889,15	47.592,49
	<b>Rasio (1/2)</b>	Ton/Th	<b>50,42</b>	<b>51,88</b>	<b>61,42</b>	<b>61,80</b>	<b>62,30</b>

*Sumber data: Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang, Tahun 2015*

#### **2.1.3.9. Urusan Pertanahan**

##### **a. Penyelesaian izin lokasi**

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang, terkait dengan penggunaan lahan Pemerintah Kabupaten Jombang telah menerbitkan izin lokasi maupun izin pemanfaatan ruang. Adapun IPR yang dikeluarkan selama lima tahun terakhir berkisar 18 sampai dengan 211 perizinan per tahun.

Beberapa izin yang tidak dapat diterbitkan sebagian karena alasan administrasi yang belum dilengkapi oleh pemohon, dan sebagian karena ketidaksiesuaian dengan rencana tata ruang. Perkembangan penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Jombang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tersaji dalam tabel berikut:



**Tabel 2.46**  
**Jumlah Penyelesaian IPR di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah izin yang diterbitkan	Bh	18	55	89	167	211
2	Permohonan Izin	Bh	82	110	146	183	212
	Rasio (1) / (2)	%	21,95	50,00	60,95	91,25	99,52

*Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang, 2017*

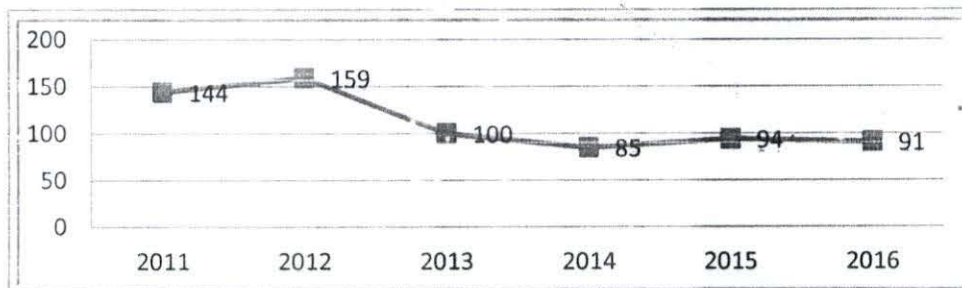
### 2.1.3.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

#### a. Pasangan berakte nikah

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan untuk penduduk muslim (beragama islam) dicatat di Kementerian Agama sedangkan perkawinan untuk penduduk non muslim (selain agama islam) dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selama tahun 2011-2016 tercatat perkawinan di Kabupaten Jombang berfluktuatif, pada tahun tahun 2011 tercatat sebanyak 13.542 akte nikah yang terdiri dari 13.542 akte nikah pada Kementerian Agama dan 144 akte nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan pada tahun 2012 tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 159 akte nikah, pada tahun 2013 sejumlah 100 akte kawin serta 85 diterbitkan pada Tahun 2014, dan pada tahun 2015 telah diterbitkan akte kawin sebanyak 94, dan ditahun 2016 tercatat sebanyak 91 akte nikah.

**Gambar 2.18**  
**Perkembangan Jumlah Penerbitan Akte Nikah Tahun 2011-2016**



*Sumber data: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2016*

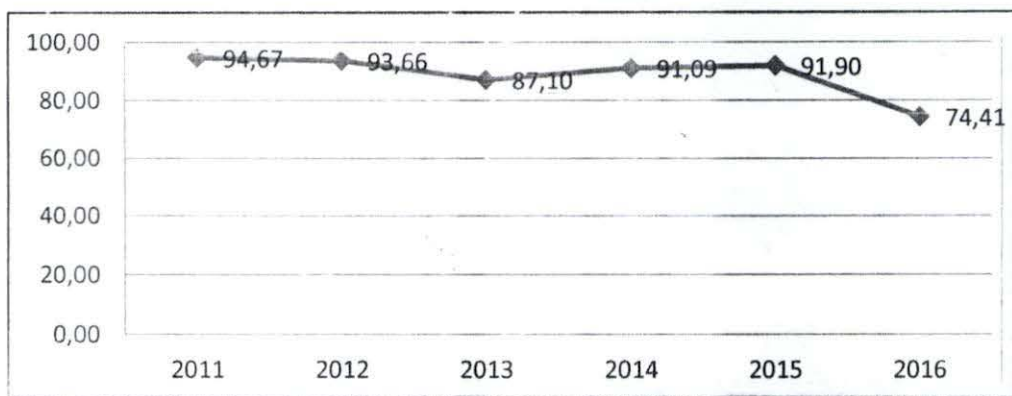
#### b. Kepemilikan KTP

Kesadaran masyarakat kabupaten Jombang terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan tergolong cukup baik. Hal tersebut terlihat dari besarnya jumlah warga yang memiliki KTP dibanding jumlah warga yang belum memiliki KTP. Jumlah warga yang wajib memiliki KTP pada tahun 2016 sebanyak 1.391.336 orang. Dari jumlah tersebut 1.035.430 orang atau 74,41



% telah memiliki KTP dan sisanya hanya sebanyak 355.906 orang atau 25,59 % belum memiliki KTP. Sedangkan jumlah warga yang wajib memiliki KTP pada tahun 2012 sebanyak 1.058.322 orang. Dari jumlah tersebut 991.263 orang 93,66 % telah memiliki KTP dan sisanya hanya sebanyak 67.059 orang atau 6,34 % belum memiliki KTP. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 yakni dari 1.060.634 yang wajib memiliki KTP, penduduk yang memiliki KTP sebanyak 1.004.063. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 920.173 dari 1.056.217 wajib KTP atau 87,1 %. Pada tahun 2015 jumlah warga yang memiliki KTP sebanyak 956.683 dari yang wajib memiliki KTP sejumlah 1.040.981 atau capaiannya sebesar 91,9 %. Capaian ini lebih tinggi dibanding tahun 2014, dimana jumlah warga yang wajib memiliki KTP sebanyak 1.025.666 sedangkan warga yang telah memiliki KTP sebanyak 934.363 atau sebesar 91,09%, sisanya sebanyak 91.303 orang atau 8,91 % belum memiliki KTP.

**Gambar 2.19**  
**Persentase kepemilikan KTP Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2011-2016**



*Sumber data: Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Jombang, Tahun 2016*

**c. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk**

Kesadaran masyarakat kabupaten Jombang terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam hal kepemilikan akta kelahiran tergolong cukup menggambarakan. Hal tersebut terlihat dari besarnya jumlah warga yang memiliki akta kelahiran dibanding jumlah penduduk. Selama tahun 2011-2016 pelayanan akte kelahiran yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 143.277 lembar. Pada tahun 2011 tercatat ada sebanyak sebanyak 63.750 lembar, tahun 2012 sebanyak 8.869 lembar, pada tahun 2013 sebanyak 27.280 lembar, pada tahun 2014 sebanyak 25.750 lembar, tahun 2015 sebanyak 17.628 lembar dan pada tahun 2016 sebanyak 355.220 lembar dari jumlah penduduk sebanyak 1.391.336. Cakupan penduduk yang memiliki akte kelahiran pada tahun 2016 sebesar 25% atau 255 per 1.000 penduduk.

**d. NIK Berbasis SIAK**

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2007 telah mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku secara Nasional melalui pendataan ulang (coklit) dengan Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang



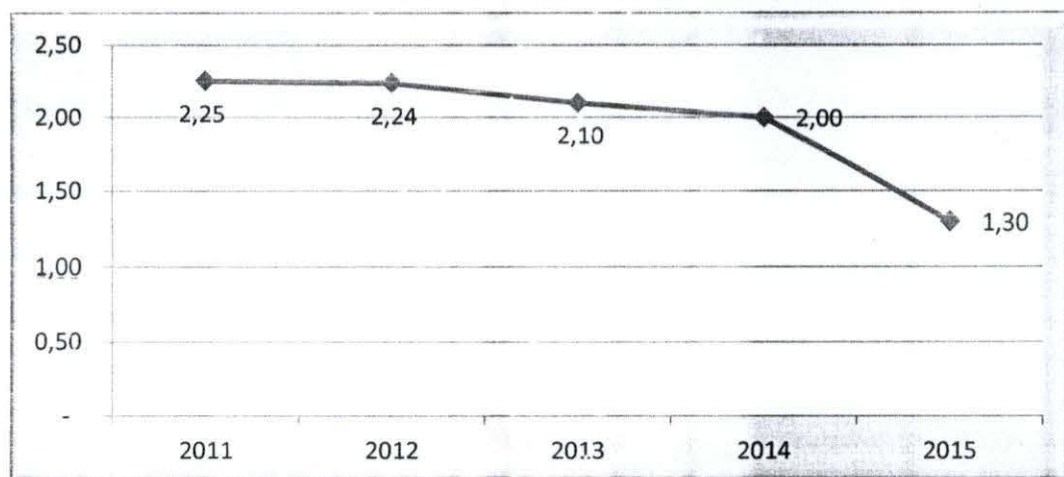
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. NIK ini adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, berlaku seumur hidup dan selamanya. NIK dicatumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan (KK dan KTP) dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Berdasarkan data SIAK, maka jumlah penduduk Kabupaten Jombang yang telah mempunyai NIK tahun 2016 sebanyak 1.391.336 penduduk, yang berarti meningkat sebesar 1,51% dibandingkan tahun 2015 yang sebanyak 1.370.227 penduduk.

**2.1.3.11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**  
**a. Angka kelahiran total**

Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*), yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu sejak awal usia subur sampai akhir masa reproduksinya.

**Gambar 2.20**  
**Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2011-2015**



Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jombang, data diolah

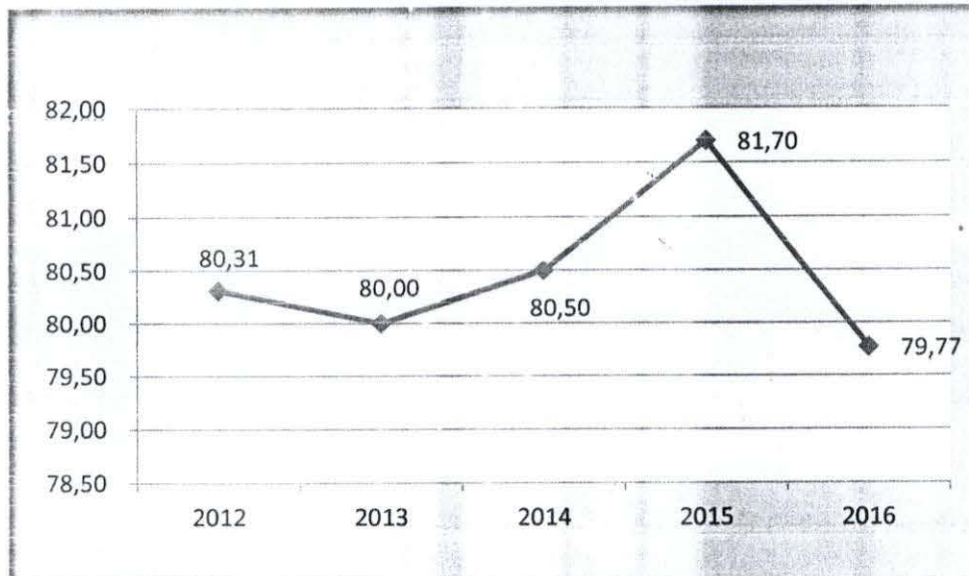
Angka TFR tahun 2015 sebesar 1,3, sehingga selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu di Kabupaten Jombang trennya menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran penduduk akan pengendalian jumlah anak semakin meningkat sebagai dampak dari keberhasilan program keluarga berencana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

**b. Rasio akseptor KB**

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Selama kurun waktu 2012 sampai dengan tahun 2016, rasio peserta KB terhadap pasangan usia subur (PUS) cenderung stabil, yaitu sebesar 80,31% pada 2012 turun menjadi 80,00 pada tahun 2013, meningkat menjadi 80,50% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 rasionya naik menjadi 81,70, namun kembali turun menjadi 79,77% di tahun 2016.



**Gambar 2.21**  
**Rasio Akseptor KB Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2012-2016**



Sumber data: BPPKB Kabupaten Jombang, Tahun 2016

### **2.1.3.12. Urusan Sosial**

#### **a. Sarana sosial**

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang ikut berperan dalam penanganan PMKS. Jumlah sarana sosial tersebut sepanjang tahun 2011-2015 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 45 buah.

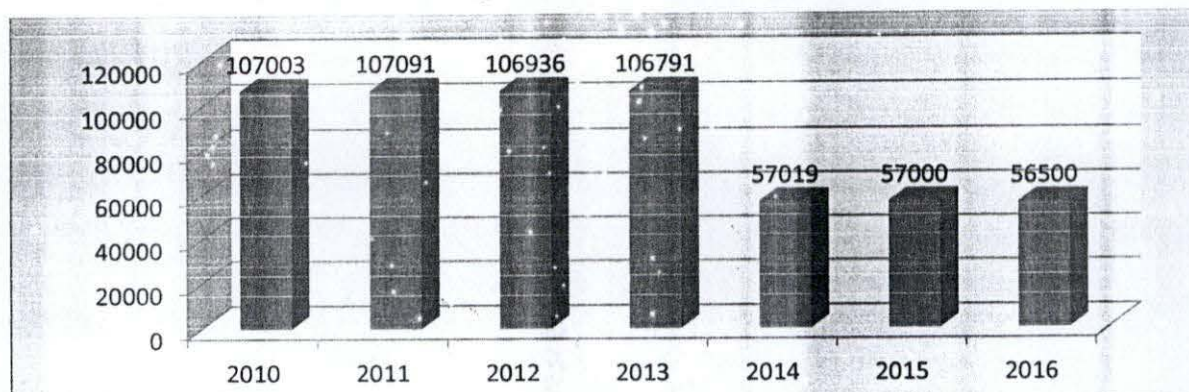
#### **b. Jumlah PMKS**

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Jumlah PMKS di Kabupaten Jombang yang terdiri dari 28 jenis PMKS selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 90 orang, yaitu dari sebanyak 107.026 orang pada tahun 2009 menjadi sebanyak 106.936 orang pada tahun 2012. Jumlah PMKS ini terus mengalami menurun sampai tahun 2015 menjadi 57.000 orang. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan indikator sasaran berupa menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dari yang ditargetkan sebanyak 56.831 orang, pada tahun 2016 menurun sebanyak 331 orang menjadi 56.500 orang, sehingga pencapaian kinerja sebesar 100,94%.



**Gambar 2.22**  
**Jumlah PMKS Kabupaten Jombang Tahun 2010-2016**



Sumber data: Dinas Sosial Tahun 2017, data diolah

### 2.1.3.13. Urusan Ketenagakerjaan

#### a. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun keatas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Jumlah penduduk usia kerja di Kab. Jombang dalam enam tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tambahannya dalam enam tahun terakhir (2011 – 2016) mencapai 50.831 orang atau rata-rata tumbuh sebesar 1,13 persen per tahun. Cukup tingginya tambahan tenaga kerja dalam enam tahun terakhir ini bisa dipahami karena Jombang memiliki posisi wilayah yang strategis yang tentunya sangat menarik bagi para pendatang baik dari luar Kabupaten Jombang, dalam provinsi maupun dari luar Provinsi Jawa Timur untuk berusaha maupun sekolah.

Angkatan kerja merupakan usia kerja yang aktif secara ekonomi baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Selama periode 2011-2016 jumlah angkatan kerja di Kab. Jombang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja mencapai 620.258 orang, dan tahun 2016 meningkat menjadi 658.381 orang. Terjadinya peningkatan angkatan kerja dalam kurun waktu enam tahun ini dapat disebabkan oleh meningkatnya angkatan kerja yang seharusnya masih berstatus bersekolah, maupun meningkatnya peluang kerja di Kabupaten Jombang.

TPAK Kabupaten Jombang selama enam tahun terakhir mengalami trend yang berfluktuatif. Pada tahun 2011 TPAK Kab. Jombang sebesar 68,92 persen, turun menjadi 66,54 persen pada tahun 2012, turun lagi menjadi 64,22 persen pada tahun 2013, meningkat menjadi 64,82 persen pada tahun 2014, meningkat lagi menjadi 68,79 persen pada tahun 2015 dan puncaknya pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 69,25 persen, artinya dalam rentang waktu enam tahun telah terjadi peningkatan TPAK sebesar 0,33 persen.

Gambaran kondisi jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk usia kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja kurun waktu 2011 – 2016 di Kabupaten Jombang sebagaimana Tabel berikut ini:



**Tabel 2.47**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2011-2016**

URAIAN	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Angkatan Kerja	orang	620.258	601.914	584.887	604.172	647.442	658.381
Jumlah Penduduk Usia Kerja (usia > 15 Tahun)	orang	899.968	904.625	910.754	923.028	941.171	950.799
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	68,92	66,54	64,22	64,82	68,79	69,25

Sumber data: BPS Sakernas Agustus Tahun 2013-2016, Data diolah

Kondisi semakin meningkatnya jumlah Penduduk usia Kerja, jumlah angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja juga akan diimbangi dengan meningkatnya jumlah pencari kerja. Kondisi jumlah pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang, Lowongan Kerja yang terdaftar, jumlah pencari kerja terdaftar yang telah di tempatkan, Persentase jumlah pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja terdaftar serta Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan terhadap lowongan kerja terdaftar dapat dilihat dalam kurun waktu enam tahun sebagaimana table 2.23 berikut ini:

**Gambar 2.23**  
**Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Terdaftar dan Pemenuhan Lowongan**

No	Tahun	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pencari kerja terdaftar (orang)	1.546	5.648	10.590	4.240	3.437	752
2	Lowongan kerja terdaftar (orang)	5.710	5.306	6.369	2.756	2.096	520
3	Penempatan pencari kerja (orang)	1.327	1.877	2.583	2.684	1.638	484
4	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja terdaftar (%)	85.83	33.23	24.39	63.30	47.66	64.36
5	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan terhadap lowongan kerja terdaftar (%)	23.24	35.38	40.56	97.39	78.15	93.08

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2016, Data diolah

Dari tabel 2.23 tersebut, terlihat bahwa jumlah pencari kerja terdaftar dari tahun ke tahun lebih tinggi dibandingkan dengan lowongan kerja terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan serapan tenaga kerja di sektor formal belum mampu menampung semua pencari kerja yang ada. Strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini antara lain dengan meningkatkan usaha informal melalui wirausaha baru, meningkatkan dan mempersiapkan angkatan kerja dengan keahlian dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta menahan penduduk usia kerja yang



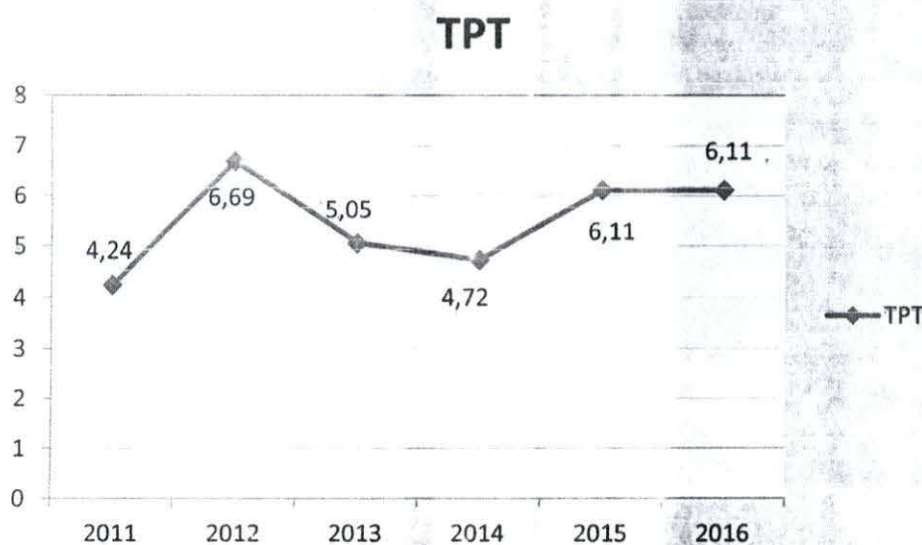
masuk dalam usia bersekolah untuk tetap bersekolah. Upaya dan strategi ini dapat dilihat keberhasilannya dari tabel 2.60 yang menunjukkan bahwa trend pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang terus mengalami penurunan. Pada kurun waktu tahun 2013-2016 terjadi penurunan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 9.838 orang. Namun secara prosentase jumlah pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja terdaftar mengalami trend kenaikan dari 24,39 persen menjadi 64,36 persen. Trend peningkatan juga ditunjukkan dari besaran Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan terhadap lowongan kerja terdaftar dari besaran 40,56 persen tahun 2013 menjadi 93,08 persen pada tahun 2016.

**b. Tingkat pengangguran terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Beberapa faktor penentu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut BPS adalah pertumbuhan ekonomi dan tambahan Angkatan Kerja Baru yang baru lulus sekolah, PHK, sisa pengangguran tahun lalu serta Kelompok Bukan Angkatan Kerja karena faktor ekonomi masuk ke dunia kerja.

TPT Kabupaten Jombang selama enam tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2010 sebesar 5,27persen, turun menjadi 4,24 persen pada 2011, naik drastis menjadi 6,69persen pada tahun 2012, kemudian berangsur-angsur turun menjadi 5,05 persen pada 2013, dan 4,73 persen pada 2014. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 naik lagi menjadi 6,11 persen. Hal ini disebabkan karena banyaknya pemutusan hubungan kerja sektor usaha formal karena dampak melemahnya ekonomi global, serta banyaknya tambahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan tambahan lowongan kerja yang ada. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang dalam enam tahun sebagaimana gambar berikut ini:

**Gambar 2.24**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2016**



Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2016. data diolah



### c. Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Perkembangan rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Jombang selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.48 berikut ini:

**Tabel 2.48**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2011-2016**

No.	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun (jiwa)	310.169	304.743	302.342	316.853	303.503	309.870
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun (jiwa)	88.391	85.913	87.273	90.266	103.032	90.182
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) (jiwa)	398.560	390.656	389.615	407.119	406.535	400.052
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun (jiwa)	810.612	826.904	834.852	827.582	963.692	847.251
	Rasio ketergantungan total (%)	49.17	47.24	46.67	49.17	42,19	47,22

*Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2016, Data diolah*

Rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang dalam kurun waktu enam tahun berfluktuatif dari angka terendah sebesar 42,19 persen pada tahun 2015 dan tertinggi pada tahun 2011 dan 2014 sebesar 49.17 persen. Pada tahun 2016 rasio ketergantungan mengalami kenaikan menjadi sebesar 47,22 persen dari tahun 2015 sebesar 42,19 persen, artinya beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif lebih berat dibanding pada tahun 2015.

### d. Rasio daya serap tenaga kerja

Salah satu peran industri dalam mensejahterakan masyarakat Jombang adalah pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang, yang selanjutnya akan mendorong peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN/swasta. Dalam kurun waktu tahun 2012-2016, jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Jombang serta Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN angkanya berfluktuatif. Dari angka rasio serapan tenaga kerjanya pun angkanya berfluktuatif. Pada tahun 2015 angka rasio daya serap tenaga kerjanya sebesar 90,33 orang/perusahaan, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 83,24 orang/perusahaan. Dari angka tersebut dapat dikatakan rata-rata



perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang tahun 2016 mampu menyerap 83 orang tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari penduduk lokal ( 70.679 orang) dan hanya 75 orang yang berkewarganegaraan asing atau 0,11% dari seluruh tenaga kerja. Perkembangan rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Jombang tahun 2012-2016 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.49**  
**Perkembangan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**  
**Di Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1. Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA/PMDN	30.733	30.458	62.673	74.884	70.754
2. Jumlah PMA / PMDN	818	832	807	829	850
3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (1) / (2)	37,57	36,61	77,66	90,33	83,24

*Sumber data: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang, Tahun 2016*

#### **2.1.3.14. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

##### **a. Prosentase koperasi sehat dan aktif**

Secara umum semangat masyarakat mulai pulih dalam melakukan aktivitas perekonomian, khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi sebagai lembaga penunjangnya. Dalam kurun waktu enam tahun, jumlah koperasi di Kabupaten Jombang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang lebih memprioritaskan pada peningkatan kualitas koperasi yang sudah ada. Disamping itu, penguatan manajemen koperasi akan terus dilakukan melalui pembinaan manajemen kelembagaan koperasi yang ada dan optimalisasi peran Koperasi Wanita (kopwan), Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Dari 820 unit Koperasi tersebut terdapat 319 unit Koperasi Wanita yang tersebar di 306 Desa/Kelurahan, 27 unit KUD dan 43 unit KMDH.

Pada kurun waktu 2012-2016 terdapat 325 unit koperasi sehat atau 39,63 persen. Rendahnya progres peningkatan jumlah Koperasi Sehat ini dipengaruhi banyaknya Koperasi Wanita, KUD dan KMDH yang masih membutuhkan pendampingan baik dalam segi manajerial, pengelolaan keuangan hingga penyusunan laporan pembukuan menuju Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tepat waktu. Tabel 2.50 menunjukkan perkembangan koperasi sehat dari tahun 2012-2016.

**Tabel 2.50**  
**Prosentase Jumlah Koperasi Sehat Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Koperasi (Unit)	820	821	820	820	820
2.	Jumlah Koperasi Sehat (Unit)	295	325	325	325	325
3.	Jumlah Koperasi Sehat (%)	35,98	39,59	39,63	39,63	39,63

*Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang, Tahun 2016*



Di Kabupaten Jombang, masih terdapat Koperasi yang tidak aktif. Pada kurun waktu 2014-2016 jumlah Koperasi Aktif berjumlah 765 unit atau sebesar 93,29 persen dari jumlah seluruh Koperasi sebesar 820 unit koperasi dan jumlah Koperasi tidak aktif 55 unit atau 6,7 persen..Gambaran kualitas kelembagaan koperasi yang ada di Kabupaten Jombang tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tersaji dalam tabel 2.51 berikut ini:

**Tabel 2.51**  
**Prosentase Jumlah Koperasi Aktif 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Koperasi (Unit)	820	821	820	820	820
2.	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	765	766	765	765	765
3.	% Jumlah Koperasi Aktif	93,29	93,30	93,29	93,29	93.30

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang, Tahun 2016

Secara umum kinerja koperasi masih perlu ditingkatkan bila dikaitkan dengan visi Kepala Daerah terpilih, yaitu **“Jombang Sejahtera untuk Semua”**, dimana keberadaan Koperasi belum mampu memenuhi harapan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini disebabkan karena kelembagaan koperasi di Kabupaten Jombang rata-rata masih mengandalkan unit simpan pinjam sebagai pokok usahanya. Kondisi tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja koperasi di masa mendatang, sehingga kegiatan usaha koperasi tidak hanya pada unit simpan pinjam tetapi menyentuh langsung pada sektor-sektor riil yang secara langsung dapat bermanfaat bagi anggota koperasi

#### **b. Usaha mikro dan kecil menengah**

Di Kabupaten Jombang, pembangunan UMKM tahun 2014-2018 diarahkan pada peningkatan kesempatan dalam berwirausaha dengan indikator sasaran:

- 1) Meningkatkan jumlah wirausaha baru (WUB)  
Pada tahun 2015, terealisasi sebesar 128 wirausaha baru dan tahun 2016 terdapat tambahan 45 wirausaha baru sehingga menjadi 173 wirausaha baru. Peningkatan ini salah satunya dilakukan melalui peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis dari calon wirausaha baru.
- 2) Terwujudnya *one village one product* (Jenis)  
Pada tahun 2015, terealisasi sebanyak 18 produk dan pada tahun 2016 terdapat tambahan 18 produk baru. Sehingga secara kumulatif sampai dengan tahun 2016 telah terdapat 36 produk yang terfasilitasi.

#### **2.1.3.15. Urusan Penanaman Modal**

Pembangunan ekonomi yang ada di Kabupaten Jombang dapat dipercepat melalui peningkatan penanaman modal atau investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kegiatan penanaman modal atau tingkat investasi yang tinggi, akan mampu



meningkatkan produktivitas, kapasitas dan kualitas produksi sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi.

Kabupaten Jombang juga memberikan kontribusi investasi dari seluruh nilai investasi di Jawa Timur. Hal ini berarti Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten yang kondusif untuk berinvestasi. Indikator sasaran yang dicapai berupa peningkatan jumlah PMA dan PMDN sebanyak 15 PMA dan 106 PMDN dari target 14 PMA dan 10 PMDN pada tahun 2016. Guna mewujudkan pencapaian indikator sasaran tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan meningkatkan kondusivitas iklim investasi di daerah dengan beberapa program strategis. Berikut ini beberapa indikator yang bisa menjadi parameter perkembangan iklim investasi dan penanaman modal di Kabupaten Jombang.

**a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**

Jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten Jombang dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, Kabupaten Jombang mampu menarik sebanyak 15 PMA, dan mengalami kenaikan 2 PMA (PT. Jack Lucky dan PT. Uniformosa Footwear) dibandingkan tahun 2015. Kabupaten Jombang juga mampu menarik investor sebanyak 106 PMDN dari target 10 PMDN. Hal ini terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2015 yang hanya 95 PMDN atau terjadi kenaikan sebesar 111,579%, kenaikan yang cukup signifikan ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi terkait proses Perijinan PMDN, yang semula dilayani oleh Pemerintah Pusat sekarang diserahkan ke Daerah.

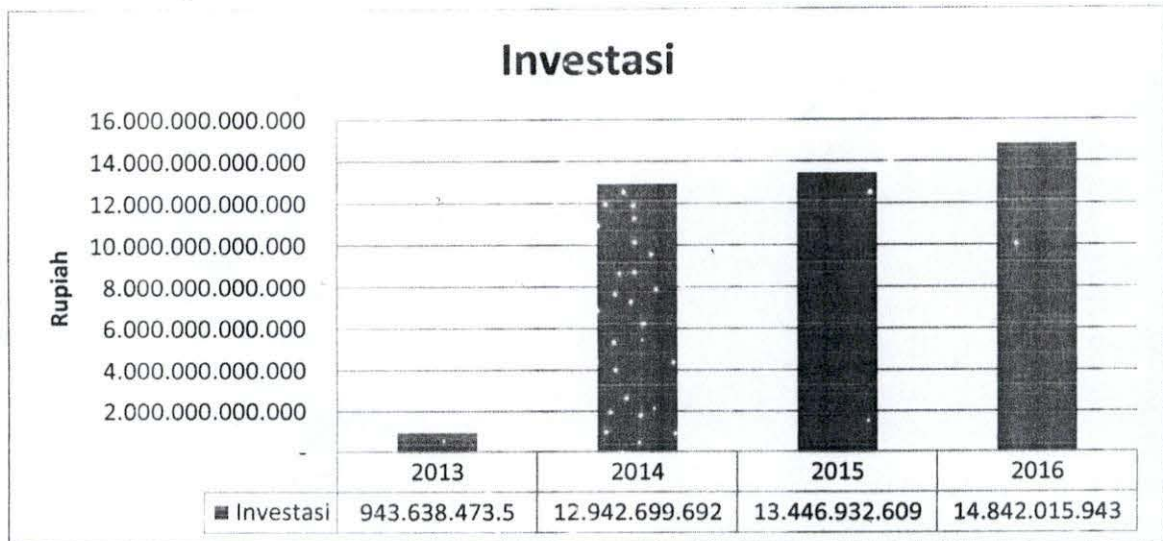
Untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, maka perlu dilakukan peningkatan upaya promosi potensi daerah secara efektif serta memberikan kepastian perizinan kepada investor, baik dalam maupun luar negeri, yang akan menginvestasikan dananya di Kabupaten Jombang. Peningkatan investasi dan usaha di Kabupaten Jombang akan menambah perluasan dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Jombang.

**b. Nilai investasi daerah di Kabupaten Jombang**

Sedangkan nilai investasi daerah di Kabupaten Jombang pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. . 14.842.015.943 (dalam ribuan) atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.395.083.334 (dalam ribuan) dibanding Tahun 2015 yang mencapai Rp. 13.446.932.609(dalam ribuan). Kenaikan ini sangat menggembirakan bila dilihat pada tahun 2014 capaian investasi yang ada sebesar Rp. 12.942.699.692.234 (dalam ribuan) Sedangkan kenaikan investasi dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 0,10%. Naiknya nilai investasi tersebut disebabkan iklim bisnis di Kabupaten Jombang yang semakin kondusif dan gencarnya promosi produk-produk unggulan.



**Gambar 2.25**  
**Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2016**



Sumber data: Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jombang, Tahun 2016

**2.1.3.16. Urusan Kebudayaan**

**a. Jumlah grup kesenian**

Untuk menopang pelestarian seni dan budaya, maka perlu upaya dan kerjasama segenap elemen masyarakat dalam menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Kelompok seni yang ada pada tahun 2014 sebanyak 629 kelompok. Jika dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 503, maka terdapat peningkatan sejumlah 126 kelompok atau naik sebesar 25%. Kenaikan jumlah kelompok seni ini disebabkan oleh adanya festival budaya lokal Jombang, sehingga memberikan motivasi bagi para generasi muda untuk membentuk kelompok seni atau budaya. Pada tahun 2015 jumlahnya menurun menjadi 524 kelompok dikarenakan tidak diperbarunya ijin pendaftaran kelompok seni budaya, hal ini disebabkan sudah tidak aktif melakukan kegiatan atau telah meninggal dunia. Sedangkan untuk tahun 2016 ada peningkatan jumlah kelompok seni sebanyak 695 kelompok.

**b. Jumlah gedung**

Jumlah gedung kesenian saat ini di Kabupaten Jombang masih belum tersedia, sehingga perlu adanya pengadaan gedung kesenian untuk menjaga dan melestarikan kesenian daerah supaya seni dan budaya daerah bisa dikenal luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Jombang.

**c. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya**

Sehubungan dengan belum tersedianya gedung kesenian di Kabupaten Jombang, maka penyelenggaraan seni dan budaya memanfaatkan sarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, antara lain di GOR, Stadion, Alun-Alun, Tirta Wisata, Sendang Made Sumberboto, Lapangan Sembung, Lapangan Desa Bawangan, GOR Kabuh, Gedung Koperasi, Plaza Theater, Gedung Serbaguna Mojoagung, Aula Departemen Agama, Aula PSBR, dan Gedung Korpri. Dengan dukungan tempat penyelenggaraan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kegiatan seni dan budaya yang dilaksanakan



#### **d. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan**

Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak peninggalan arkeologi (purbakala). Hal ini dikarenakan Kabupaten Jombang pada masa lalu memiliki peranan yang penting sebagai daerah pemukiman, pusat keagamaan, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian dari masa ke masa. Letak Kabupaten Jombang yang berada di daerah aliran Sungai Brantas dan ujung timur Pegunungan Kendeng membawa Kabupaten Jombang sebagai tempat hunian manusia purba masa prasejarah. Pada masa selanjutnya, peninggalan-peninggalan penguasa seperti Mpu Sindok dan Airlangga ada di wilayah Kabupaten Jombang. Pada masa Majapahit Kabupaten Jombang merupakan bagian dari ibukota Majapahit, sebagai salah satu pintu masuk ibu kota Majapahit.

Upaya pelestarian yang telah dilakukan oleh Kabupaten Jombang sebagai langkah awal dalam perlindungan secara fisik adalah dengan melakukan inventarisasi dan registrasi benda budaya yang ada bekerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur pada tahun 2010. Hasil inventarisasi dan registrasi benda budaya tercatat terdapat 19 buah benda budaya tidak bergerak dan 159 benda budaya bergerak, yang tersebar di 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Jombang, Kecamatan Diwek, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Perak, Kecamatan Bareng, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Kesamben.

Benda budaya tidak bergerak terdiri dari 1 buah Lapas (Jombang), 3 buah Menara Air (Ringin contong, Peterongan dan Mojoagung), 3 buah Candi (Pundong, Sumber Boto dan Tampingmojo), 1 buah Gereja (Kristen Jawi Wetan Ngoro), 1 buah Gua (Made), 5 buah Situs (Jladri, Grobogan, Watumiring, Watukucur, Mbah Hadi Mulyo), 2 buah Pabrik Gula (Tjoekir dan Djombang Baru), 1 buah Rumah Sakit Kristen (Mojowarno), 1 buah Gardu (Papak) dan 1 buah Stasiun KA (Jombang).

Sedangkan benda budaya bergerak terdiri atas arca (batu dan terakota), anak timbangan batu, basi porselin, bata, cermin kuningan, cupu porselin, fosil kerang, Fr. arca batu, Fr. pipisan, Fr. pipisan batu, Fr. yoni batu, gelang tangan, perunggu, genta perunggu, guci porselin, kelat bahu perunggu, kepala arca logam, kowi terakota, lampu perunggu, lemari buku kayu, lonceng besi, lumping batu, mangkuk porselin, mata tombak besi, meja kenap kayu dan meja mimbar kayu, piring porselin, tangkai cermin logam, tombak besi, topeng, topeng perunggu, tugu (batu dan menturo), tutup cupu porselin, umpak batu, yoni batu dan tempat lampu (blencong).

#### **2.1.3.17. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Jumlah gedung olah raga di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tidak berubah hanya memiliki 1 gedung olah raga, kemudian pada tahun 2014 terdapat penambahan satu gedung lagi, yaitu satu lapangan tenis indoor, sehingga total menjadi 2 gedung.



**Tabel 2.52**  
**Gedung Olahraga Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016**

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah gedung olahraga	1	1	2	2	2

*Sumber data: Dispora Kabupaten Jombang, Tahun 2017*

### **2.1.3.18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

#### **a. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk**

Pada tahun 2016, jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jombang sebanyak 180 orang, yang tersebar di kabupaten dan 21 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang mencapai 1.379.631 orang, maka rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk adalah sebesar 1:24.

#### **b. Jumlah tenaga linmas**

Sampai dengan tahun 2016, telah tersedia tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) sebanyak 17.442 orang yang tersebar pada 21 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.694 orang di antaranya telah mendapatkan pelatihan khusus menangani masalah-masalah Kamtibmas. Jumlah Linmas ini mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 9.650 orang.

#### **c. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten**

Sarana untuk pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Jombang masih sangat minim. Untuk melayani 306 desa/kelurahan di 21 kecamatan hanya tersedia 3 mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil suplai air (truk tangki). Dengan sarana yang ada di kabupaten tersebut serta jangkauan wilayahnya yang cukup luas, maka pelayanan penanganan kebakaran di wilayah pinggiran akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, setidaknya perlu ditambah lagi 3 posko pemadam kebakaran yang dilengkapi mobil pemadam untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten.

#### **d. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah standar waktu yang diperlukan pemadam kebakaran untuk sampai pada lokasi kebakaran setelah adanya laporan kejadian. Tingkat waktu tanggap yang ditetapkan adalah 15 menit. Namun dengan kendala terbatasnya sarana yang ada, yang mana saat ini terdapat 2 WMK yaitu di Jombang dan di Mojoagung dan seharusnya ada 5 WMK, maka tingkat waktu tanggap tersebut akan sulit dicapai bila kebakaran terjadi di wilayah pinggiran. Oleh karena itu, perlu disusun studi kelayakan untuk penambahan minimal 3 posko lagi serta mobil pemadam dalam menjangkau semua wilayah sesuai dengan tingkat waktu tanggap yang ditetapkan.



### **2.1.3.19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka dilaksanakan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk menunjang kinerja pelayanan, kondusifitas daerah, serta iklim usaha.

#### **a. Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah**

- o **Informasi pelayanan perizinan:** jika SES mengajukan ijin dapat dipantau sampai mana berkas perizinannya dan terintegrasi antar bidang administrasi, pengawasan dan pengaduan, dan penelitian lapangan, sehingga dapat terpantau posisi berkas sudah sampai mana.
- o **Administrasi pemerintahan:** Sistem Informasi Manajemen Daerah, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Elektronik-Procurement, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah. Dan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik.

#### **b. Penegakan perda tramtib**

Untuk menentukan tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah diukur berdasarkan jumlah pelanggaran terhadap peraturan tentang ketenteraman dan ketertiban. Semakin rendah jumlah pelanggaran yang ditemukan menunjukkan semakin tingginya ketaatan masyarakat terhadap peraturan tentang ketenteraman dan ketertiban. Indikator tersebut menjadi ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menjalankan peran pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Jumlah kasus pelanggaran masyarakat terhadap Perda Tramtib yang ditemukan sepanjang tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 13% atau sebanyak 101 kejadian dan selesai sebanyak 63 kasus. Jika dibandingkan dengan perkiraan berdasarkan temuan kejadian tahun sebelumnya sebanyak 140 kejadian, terjadi penurunan sebanyak 39 kejadian. Pelanggaran Perda Tramtib yang banyak terjadi di antaranya adalah pemasangan spanduk liar, tindakan asusila, gelandangan dan pengemis, serta kenakalan remaja.

#### **c. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)**

Tingkat ketentraman masyarakat ditunjukkan dengan terwujudnya suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Hal ini merupakan dampak dari upaya-upaya Pemerintah Daerah bersama dengan aparat keamanan dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban dengan menyelesaikan setiap permasalahan di masyarakat dengan baik.

Selama tahun 2016, secara umum kondisi Kamtibmas di Kabupaten Jombang dalam suasana kondusif. Seluruh permasalahan yang timbul seluruhnya dapat ditangani oleh aparat pemerintah mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa atau capaian sebesar 100%.



Keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut tidak terlepas dari upaya antisipasi dan pencegahan yang telah dilakukan secara sistematis dan terbentuknya jaringan kerja sama dengan elemen masyarakat. Pencegahan terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan situasi kondisi wilayah dan ketahanan bangsa ditempuh melalui koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) secara rutin setiap bulan, pelatihan dan pendidikan bela negara, seminar peningkatan wawasan kebangsaan, dan penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat.

Di Kabupaten Jombang telah terbentuk jaringan 125 unit Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang mengadakan pertemuan secara berkala 3 bulan sekali guna membahas permasalahan Kamtibmas yang muncul seperti kasus tindak pidana ringan dan mengantisipasi hal-hal yang mengganggu kamtibmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Jombang.

Di samping itu Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah membudayakan diskusi politik dan forum penciptaan iklim demokrasi yang sehat, seperti bagaimana menyalurkan pendapat yang baik, sehingga tidak menimbulkan tindakan yang anarkis dihadiri berbagai elemen masyarakat dari kalangan LSM, organisasi masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan. Kegiatan penunjang lainnya adalah pertemuan rutin setiap tribulan berupa silaturahmi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

#### **d. Sistem informasi manajemen pemerintah daerah**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Pemerintahan Daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka diperlukan suatu Sistem Informasi Manajemen yang memadai. Dalam hal ini Kabupaten Jombang memiliki 7 (tujuh) Sistem Informasi manajemen yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Elektronik-Procurement (SIPD E-Proc), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMK), Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBD), dan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik.

#### **e. Jenis dan jumlah bank dan cabang**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



Keberadaan suatu Bank dan cabangnya di Kabupaten Jombang merupakan salah wujud fasilitasi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi khususnya bidang keuangan. Selama beberapa tahun terakhir perkembangan jumlah bank dan cabangnya di Kabupaten Jombang menunjukkan hasil yang menggemblakan. Itu bisa dilihat dari beberapa bank yang sudah berjalan dan beroperasi di Kabupaten Jombang, diantaranya bank BNI, BRI, bank Mandiri, BTN, Bank Jatim, bank Danamon, bank Panin, bank OUB Buana, bank BII dan beberapa bank yang lainnya, baik yang dilaksanakan secara konvensional maupun syariah.

#### **f. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang**

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Keberadaan perusahaan asuransi dan cabangnya di Kabupaten Jombang merupakan salah satu wujud fasilitasi Pemerintah dalam kegiatan ekonomi khususnya bidang keuangan. Adapun salah satu perusahaan asuransi di Kabupaten Jombang yaitu AJB Bumiputera 1912 dan PT. Asuransi Prudentia.

#### **g. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah**

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Oleh karena itu, pajak dan retribusi daerah sangat mempengaruhi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan APBD agar program dan kegiatan SKPD bisa berjalan dengan baik. Di Kabupaten Jombang jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, antara lain sebagai berikut :



**Tabel 2.53**  
**Jumlah dan Jenis Pajak serta Retribusi Daerah di Kabupaten Jombang**

No	JENIS	URAIAN
1	Pajak Daerah	a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Reklame; d. Pajak Penerangan Jalan (PPJ); e. Pajak Parkir; f. PBB; g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); h. Pajak Air tanah; i. Pajak Hiburan; j. Pajak Mineral bukan logam dan batuan
2	Retribusi • Jasa Umum         • Jasa usaha	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi . a. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah; b. Retribusi Penyedotan Kakus; c. Retribusi Terminal; d. Retribusi Rumah Potong Hewan; e. Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga; f. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
3	Perizinan tertentu	a. Retribusi IMB; b. Retribusi Izin Trayek.

Sumber data: BPP dan DPPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2016

#### **h. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha**

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan daerah terhadap aktifitas perekonomian. Di Kabupaten Jombang, Perda yang mendukung peningkatan iklim usaha untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yakni Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2012 yang di dalamnya memuat Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan dan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah yang diharapkan dapat menangani Urusan Penanaman Modal secara efektif dan efisien.

Selain Peraturan Daerah tersebut, di Kabupaten Jombang pada Tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta



Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi terkait Lalu lintas Pengaturan Barang dan Jasa.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif, pada tahun 2015 telah diterbitkan pula Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

**i. Lama proses perijinan**

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi yang relatif mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lamanya proses perijinan juga di dasarkan pada mekanisme dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun investor. Oleh karena itu lamanya proses perijinan sangat mempengaruhi investasi yang akan masuk ke suatu daerah dan juga bergantung pada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, sehingga akan berdampak pada peningkatan atau penurunan PDRB sektoral.

Di Kabupaten Jombang, lamanya proses perijinan bisa dilihat dari beberapa jenis perijinan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.54**  
**Lama Proses Perijinan di Kabupaten Jombang**

No	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (rata - rata maks Rph)
1.	SIUP	3	4	Gratis
2	TDP	3	4	Gratis
3	IUI	10	12	Gratis
4	TDI	10	12	Gratis
5	IMB	20	12	Tarif sesuai dengan Perda Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Minimal Rp. 4.000/m <sup>2</sup> tergantung indeks peruntukan bangunan dan lokasi bangunan.
6	HO	14	7	Tarif sesuai dengan Perda Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014. Minimal Rp.150/m <sup>2</sup> dan maksimum Rp. 450/m <sup>2</sup> sesuai dengan jenis gangguan, kawasan tempat usaha dan luasan tempat usaha.

Sumber data: BPP Kabupaten Jombang, Tahun 2016



**j. Jenis, kelas dan jumlah restoran**

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Jenis restoran di Kabupaten Jombang diklasifikasikan dalam 5 (lima) jenis, antara lain Cafe, Warung/Kantin, Lesehan, Restoran dan Rumah Makan. Secara rinci perkembangan restoran di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.55**  
**Jenis Restoran di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2011-2016**

No	Uraian	Jumlah Usaha					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Cafe	3	3	4	5	5	7
2	Warung/kantin	99	99	103	106	108	92
3	Lesehan	6	6	6	7	6	5
4	Restoran	6	6	6	7	3	4
5	Rumah makan	24	24	24	25	33	46
	JUMLAH	138	138	143	150	158	154

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2016

Pada tahun 2016 restoran di Kabupaten Jombang berjumlah sebanyak 4 buah, bertambah 1 buah jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 3 buah. Restoran jenis Warung/Kantin merupakan jenis restoran dengan jumlah terbesar, yaitu sebanyak 92 buah mengalami penurunan 16 buah dibandingkan tahun 2015, sedangkan restoran terbesar kedua adalah restoran jenis Rumah Makan, yaitu sebanyak 46 buah mengalami peningkatan sejumlah 13 buah dibandingkan tahun 2015. Jenis Lesehan berjumlah 5 buah mengalami penurunan 1 buah dibandingkan tahun 2015.

Adanya penambahan jumlah restoran selama tiga tahun terakhir menunjukkan semakin baiknya perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Jombang yang merupakan salah satu daya tarik bagi investor dalam menginvestasikan modalnya di Kabupaten Jombang.

**k. Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel**

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Hotel Berbintang dan Hotel Melati. Hotel berbintang adalah suatu usaha jasanya menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan



secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Kriteria penggolongan Hotel Berbintang didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar: Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI.

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Perkembangan jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2.56**  
**Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2013-2016**

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Juml. Hotel	Juml. Hotel	Juml. Kamar	Juml. Hotel	Juml. Hotel	Juml. Kamar	Juml. Hotel	Juml. Kamar
1	Hotel Bintang 5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Hotel Bintang 4	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hotel Bintang 3	1	110	1	110	1	170	1	100
4	Hotel Bintang 2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Hotel Bintang 1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	16	423	16	423	15	429	16	421
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>533</b>	<b>17</b>	<b>533</b>	<b>16</b>	<b>599</b>	<b>17</b>	<b>521</b>

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2016

Dari tabel diatas, terlihat adanya perkembangan jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Jombang selama lima tahun terakhir memperlihatkan adanya stagnasi jumlah hotel/penginapan. Pada tahun 2015 penginapan/hotel di Kabupaten Jombang berjumlah 16 buah bertambah menjadi 17 buah sampai dengan tahun 2016 dengan kategori hotel bintang dan non bintang



(melati dan losmen) masing-masing dengan jumlah kamar 521 buah. Pada tahun 2015 jumlah penginapan dan hotel berjumlah 16 mengalami penurunan 1 buah, namun dari sisi jumlah kamar terjadi penurunan sebanyak 78 kamar dari tahun 2014 yang berjumlah 599 kamar menjadi 521 kamar.

#### **1. Produktivitas total daerah**

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Di Kabupaten Jombang produktivitas total daerah per sektor dari tahun 2014 – 2016 terus mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana tabel berikut ini:



**Tabel 2.57**  
**Produktifitas Total Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2016**

No	SEKTOR	2014		2015		2016	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
A	PDRB	26.339.071,0	43,6	29.147.967,9	45,02	31.990.478,9	48,59
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.912.780,7	9,79	6.470.006,1	9,99	6.839.221,5	10,39
2	Pertambangan dan Penggalian	192.095,7	0,32	207.303,2	0,32	219.500,9	0,33
3	Industri Pengolahan	5.260.989,1	8,71	5.779.275,5	8,93	6.288.469,4	9,55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17.802,6	0,03	19.793,9	0,03	20.953,7	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.090,6	0,04	26.820,8	0,04	28.828,7	0,04
6	Konstruksi	2.507.318,9	4,15	2.802.004,8	4,33	3.166.119,9	4,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.755.277,6	9,53	6.432.192,9	9,93	7.272.960,4	11,05
8	Transportasi dan Pergudangan	293.921,6	0,49	326.563,6	0,50	357.061,6	0,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	548.659,6	0,91	633.684,9	0,98	730.367,3	1,11
10	Informasi dan Komunikasi	1.624.905,7	2,69	1.809.405,7	2,79	2.000.877,5	3,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	662.583,0	1,1	750.404,4	1,16	839.010,2	1,27
12	Real Estate	500.577,1	0,83	576.486,1	0,89	643.524,6	0,98
13	Jasa Perusahaan	73.826,5	0,12	80.777,1	0,12	87.852,2	0,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	945.670,0	1,57	998.254,4	1,54	1.070.712,3	1,63
15	Jasa Pendidikan	1.399.105,1	2,32	1.535.954,2	2,37	1.660.660,9	2,52
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	209.078,7	0,35	235.203,1	0,36	260.574,3	0,40
17	Jasa Lainnya	409.388,7	0,68	463.837,0	0,72	503.783,5	0,77
B	Jumlah Angkatan Kerja	604.172		647.442		658.381	

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2016.



### **2.1.3.20. Urusan Ketahanan Pangan**

#### **a. Regulasi ketahanan pangan**

Selaras dengan kebijakan Nasional sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka mendukung tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan, maka secara Nasional ditargetkan pencapaian surplus 10 juta ton. Dalam rangka mewujudkan capaian tersebut, maka tumpuan utama yang dilaksanakan adalah memperkuat produksi dan pasokan pangan. Pemerintah Kabupaten Jombang mendukung secara penuh kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan swasembada pangan melalui kebijakan-kebijakan bidang ketahanan pangan di level kabupaten.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap peningkatan ketahanan pangan di daerah antara lain diwujudkan melalui pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang dengan SK Bupati Jombang Nomor 188.4.45/47/415.10.10/2012. Tugas Dewan Ketahanan Pangan adalah merumuskan kebijakan ketahanan pangan di daerah yang meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan daerah. Selain itu untuk pelaksanaan tugas di lapangan ditetapkan Pokja Ketahanan Pangan dengan Keputusan Bupati Jombang nomor 188.4.45/347/415.10.10/2012.

Arah Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang mandiri dan berkelanjutan antara lain melalui: Membangun sistem agribisnis pangan, menciptakan nilai tambah, berbasis ekonomi pedesaan; Menjamin ketersediaan pangan melalui stabilitas produksi pangan; Mengembangkan cadangan pangan dan Memanfaatkan lahan marginal dan terlantar untuk mengembangkan pangan lokal.
2. Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga antara lain melalui: Menerapkan sistem distribusi pangan yang efisien; Menjaga stabilitas dan keberlanjutan pasokan bahan pangan; Meningkatkan aksesibilitas Ruang Tangga terhadap pangan; Menjaga stabilitas harga pangan dan Mengembangkan jejaring informasi harga dan pasar yang dapat diakses melalui media elektronik.
3. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal antara lain melalui: Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan konsumsi dan gizi keluarga; Mengembangkan aneka pangan olahan berbasis sumberdaya lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; Meningkatkan peran kelembagaan lokal untuk penyuluhan penganeekaragaman pangan dan gizi.

#### **b. Ketersediaan pangan utama**

Pangan utama masyarakat di Kabupaten Jombang masih banyak tergantung pada beras. Perkembangan ketersediaan pangan selama tahun 2013-2016 sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 2.58**  
**Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2013-2016**

Uraian	2013	2014	2015	2016
1. Ketersediaan pangan utama (Kg)	243.197.270	248.606.830	675.765.000	294.562.310
2. Jumlah Penduduk	1.224.467	1.371.497	1.240.985	1.240.895
<b>Rasio (1) / (2)</b>	<b>199</b>	<b>181</b>	<b>545</b>	<b>237</b>

Sumber data: Dinas Pertanian, Tahun 2016, Data diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, ketersediaan pangan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 381.202.690 kg atau rasio ketersediaan pangan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 56 % dibandingkan tahun 2015. Sedangkan jumlah penduduk tahun 2016 justru berkurang 0,9%.

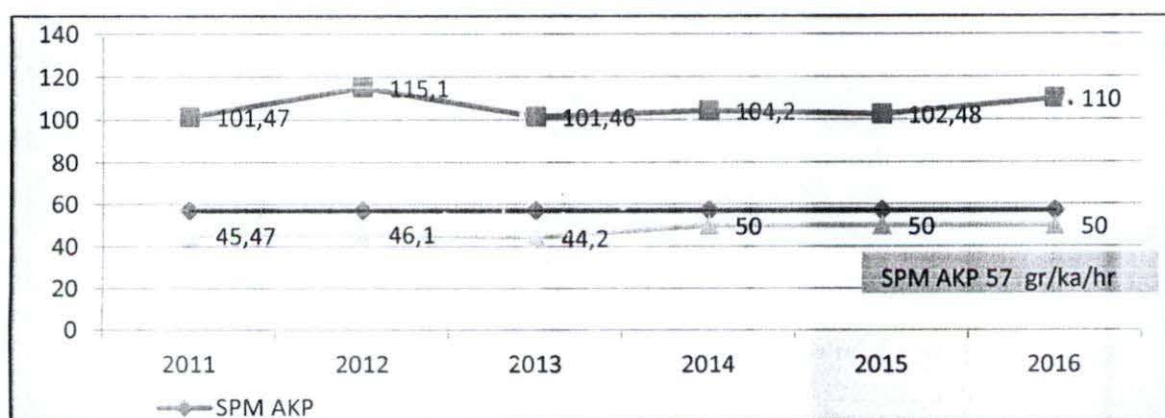
Pemerintah Kabupaten Jombang mendukung secara penuh kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan swasembada pangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama melalui kebijakan-kebijakan bidang ketahanan pangan di tingkat kabupaten. Kebijakan urusan Ketahanan Pangan ini oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dituangkandalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018, pada misi kedua yaitu “Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau” dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan sasaran:

1. Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah

Indikator sasaran terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah adalah ketersediaan energi dan protein per kapita dan kecukupan energi dan protein per kapita.

Ketersediaan energi dan protein penduduk Kabupaten Jombang selama tahun 2011-2016 telah melampaui angka kecukupan energi dan protein yang ditetapkan pada Standar Pelayanan Minimal ketahanan pangan yaitu angka kecukupan energi sebesar 2.200 kalori/kapita/hr dan protein sebesar 57 gr/kapita/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004). Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.26**  
**Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein**  
**Tahun 2011-2016**



Sumber data : Kantor Ketahanan Pangan Kab Jombang, Tahun 2016